

SKRIPSI

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA BERBASIS KINERJA
(Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro)**

Oleh:

**DIMAS PRATAMA
NPM. 1903031017**



**Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1445 H/2023 M**

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA BERBASIS KINERJA
(Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah

Oleh:

DIMAS PRATAMA
NPM. 1903031017

Pembimbing: Northa Idaman, M.M

Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2023 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Dimas Pratama
NPM : 1903031017
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERBASIS KINERJA (STUDI KASUS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO)

Sudah kami setuju dan dapat di ajukan ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan. Demikian lampiran kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Metro, 09 Oktober 2023
Dosen Pembimbing,



Northa Idaman, M.M
NIP. 19840820 201903 1 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja
(Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Metro)

Nama : Dimas Pratama

Npm : 1903031017

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 09 Oktober 2023
Dosen Pembimbing,



Northa Idaman, M.M
NIP. 19840820 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296.

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-3557 / W. 20.3 / D / PP. 00.9 / 11 / 2023.

Skripsi dengan Judul: ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERBASIS KINERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO, disusun Oleh: DIMAS PRATAMA, NPM: 1903031017, Program Studi: Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/16 November 2023.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Northa Idaman, M.M

Penguji I : Era Yudistira, M.Ak

Penguji II : Yudhistira Ardana, M.E.K

Sekretaris : Nur Syamsiyah, M.E



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Dr. Siti Fatmaha, S.Ag., M.H

NID 197206111998032001

ABSTRAK

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERBASIS KINERJA (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro)

Oleh:

**DIMAS PRATAMA
NPM. 1903031017**

Penelitian ini dilakukan di DPMPTSP Kota Metro yang bergerak pada bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kota Metro. Walaupun terdapat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) masih juga ditemui sisa anggaran yang masih belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya yang mengakibatkan menurunnya performa kinerja yang mana akan jadi bahan evaluasi di tahun berikutnya.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana realisasi anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada DPMPTSP Kota Metro. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan juga dokumentasi.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum anggaran pendapatan dan belanja yang terealisasi pada DPMPTSP Kota Metro sudah diterapkan secara efektif namun belum efisien. Dan untuk anggaran berbasis kinerja berdasarkan capaian indikator kinerja utama sudah efektif namun masih belum efisien dan belum dimaksimalkan.

Kata Kunci: *Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Pratama

NPM : 1903031017

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumber aslinya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 09 Oktober 2023
Yang Menyatakan,



Dimas Pratama
NPM. 1903031017

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah ayat 286).

“Setetes keringat orangtuaku seribu langkahku untuk maju “
“ Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda.
Sekiranya merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir
mimpi-mimpi lain bisa diciptakan ”

(Windah Basudara)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil‘alamin tiada kata yang lebih pantas diucapkan selain rasa syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa bahagia peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Pintu surgaku, cinta pertamaku, Ibunda Daryati. Yang tiada hentinya selalu mendo‘akan, mendukung, memberi kasih sayang kepada peneliti sampai akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula kepada Ayahanda Sutrisno, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih atas do‘a, cita dan cinta yang telah diberikan, sehingga satu perjalanan ini usai menuju perjalanan yang lain.
2. Untuk adikku, Ranu Prayogo. Terima kasih sudah menjadi mood booster, menjadi teman di rumah dan menjadi salah satu semangat peneliti untuk menyelesaikan studinya.
3. Bapak Northa Idaman, M.M. Selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Jodoh peneliti kelak, kamu adalah salah satu alasan peneliti menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini peneliti tidak mengetahui keberadaanmu, karena peneliti yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita, akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

5. Sahabat-sahabat peneliti Dini Al Riyati, Daniar Vika Pangesti, Esti Marina Aurifah, Sukma Wulandari, M. Tri Cahyadi, Arief Setyawan, Haris Bagus Nugraha dan Putra Alberta yang tidak pernah bosan memberikan motivasi serta dukungannya.
6. Keluarga besar Akuntansi Syariah angkatan 2019 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Keluarga besar UKM IMPOR IAIN Metro yang telah banyak memberikan pengalaman berharga, ilmu yang luas serta dukungan motivasi kepada peneliti.
8. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah rabbi'alamin. Dengan menyebut nama Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti. Dengan demikian peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro)”.

Kemudian dari pada itu skripsi ini disusun sebagai salah satu bukti syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) dengan Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro agar dapat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun). Upaya untuk menyelesaikan skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Northa Idaman, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah dan selaku Dosen pembimbing yang selalu senantiasa memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan kepada peneliti.

5. Bapak Deny Sanjaya, S.T., M.T selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro serta Bapak dan Ibu Karyawan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro yang telah memberikan ilmu serta dukungan kepada peneliti.
6. Kedua orang tua yang senantiasa tiada henti mendoakan, meridhoi, mendukung, mendorong, dan melimpahkan kasih sayangnya kepada peneliti selama masa perkuliahan.

Dengan ini peneliti selalu berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Kritik dan saran yang sangat membangun guna perbaikan serta kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan baik dan tangan terbuka.

Metro, 09 Oktober 2023

Peneliti,



Dimas Pratama
NPM. 1903031017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Relevan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Anggaran.....	15
1. Pengertian Anggaran	15
2. Fungsi Anggaran	17
3. Manfaat Anggaran.....	22
B. Anggaran Berbasis Kinerja	23
C. Faktor-faktor Keberhasilan Implementasi Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja	26

D. Laporan Realisasi Anggaran	27
E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30
F. Value For Money	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	39
E. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Visi dan Misi Lembaga	43
2. Tugas dan Fungsi Lembaga	46
3. Struktur Organisasi	47
4. Tugas Pokok Masing-masing Bagian Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.....	48
B. Hasil Penelitian	54
C. Analisis Penelitian.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Metro	6
Tabel 1.2	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DPMPTSP Kota Metro	8
Tabel 3.1	Narasumber	37
Tabel 4.1	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	58
Tabel 4.2	Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro Tahun 2021	58
Tabel 4.3	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	64
Tabel 4.4	Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro Tahun 2022	64
Tabel 4.5	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Telah diterbitkan dan Realisasi PAD dari Sektor Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro Tahun 2016-2020	71
Tabel 4.6	Uraian Struktur Laporan Realisasi Anggaran	73
Tabel 4.7	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur DPMPTSP Kota Metro	48
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu Negara untuk lebih maju dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi dan mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional yang dilaksanakan membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode.

Seiring dengan peningkatan pembangunan nasional maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Anggaran pendapatan dan belanja yang dikumpulkan dituang dalam suatu program atau rancangan pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.¹

Pemerintah adalah badan yang mengendalikan kepentingan nasional dan negara untuk mencapai tujuan, menawarkan layanan publik, dan memajukan kesejahteraan warganya. Institusi pemerintah biasanya dibentuk untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan untuk menegakkan hukum yang ditetapkan. Namun, pemerintah juga harus mampu menawarkan layanan untuk meningkatkan orientasi kebijakan, pelaksanaan program, dan pembuatan anggaran kegiatan.

Kata “anggaran” merupakan terjemahan dari kata “*budget*” dalam bahasa Inggris. Akan tetapi, kata tersebut sebenarnya berasal dari bahasa Perancis, “*bougette*” yang berarti *a small bag* atau tas kecil. Kata “*budget*” tersebut pertama kali digunakan secara formal sebagai suatu rencana keuangan pemerintah pada tahun 1733, yaitu ketika Menteri Keuangan Inggris membawa satu tas kecil yang berisi proposal keuangan pemerintah yang akan disampaikan kepada parlemen, kemudian mengatakan *let's open the budget* atau mari kita buka budget.² Anggaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk kebutuhan yang tidak terbatas. Rencana keuangan yang bersifat kuantitatif yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan yaitu anggaran, yang sifatnya bernilai uang dan jenis-jenis kebutuhan yang

¹ Andre P. Tulangow dan Treesje Runtu, “Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa” (Jurnal EMBA: 2016) 564.

² Bachtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta Barat: Akademia, 2009), 122.

dinilai oleh uang. Anggaran selalu dinyatakan dalam bentuk satuan moneter. Pada tahap pelaksanaan anggaran, akuntansi mencatat transaksi pelaksanaan anggaran. Dalam melaksanakan kegiatan pastinya harus ada perencanaan yang matang agar tercapai tujuan dari kegiatan tersebut. Salah satu komponen atau cara dalam melaksanakan suatu program ataupun suatu kegiatan yaitu dengan adanya anggaran. Dengan adanya anggaran dalam manajemen suatu kegiatan maka kita dapat menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi untuk membandingkan anggaran dengan hasil aktual, sehingga dapat mencapai seberapa besar penggunaan anggaran dalam mencapai penilaian kinerja dengan tujuan untuk memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya. Gambaran terkait penganggaran maupun pendanaan selama satu tahun terakhir dapat diketahui dengan adanya anggaran dan realisasinya. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah. Anggaran berperan penting sebagai sarana pemantapan, pengalokasian sumber daya publik, perencanaan organisasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja.

Di Indonesia, penganggaran berbasis kinerja telah digunakan untuk menggantikan penganggaran tradisional, menjadikannya salah satu fungsi penganggaran sektor publik. Penganggaran berbasis kinerja terutama didorong oleh sejumlah masalah mendasar dengan sistem pendekatan tradisional, sehingga tidak ada perhatian yang ekonomis dan efisien untuk pertimbangan saat membuat anggaran. Indikator dimasukkan dalam kertas perencanaan dan penganggaran untuk penyusunan anggaran pemerintah sebagai bagian dari

implementasi penganggaran berbasis kinerja sehingga pengembangan indikator kinerja dapat menekankan hasil. Sistem Penganggaran *Line System Budgeting* telah digantikan oleh sistem penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*), yang saat ini berkembang pesat dan digunakan secara luas oleh negara-negara industri di seluruh dunia. Tuntutan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja, ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan dengan beberapa faktor keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu :

1. Gaya kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
2. Penyempurnaan sistem administrasi secara terus menerus.
3. Sumber daya yang cukup.
4. Penghargaan (*reward*) yang jelas dan Sanksi (*punishment*) yang tegas
5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.³

Pemerintah memiliki peluang untuk menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, tetapi itu juga dapat menjadi tantangan. Hal itu dikarenakan dengan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja berarti pemerintah daerah dapat menyusun arah, kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi lingkungan daerah tersebut. Konsep anggaran berbasis kinerja telah diterapkan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro. Kegiatan perencanaan serta penganggaran harus melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan

³ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja*. 2005.

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kerja dan target kinerja sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan.

Kondisi sekarang ini masih ada satuan kerja yang menyusun aturan anggaran lebih memberikan perhatian kepada Input (*Input based*). Begitu pula halnya pada saat pelaksanaan anggaran masih terdapat satker yang berpikir bagaimana menghabiskan anggaran yang tersedia lebih menjadi tujuan daripada pencapaian target kinerja yang telah disepakati dalam dokumen anggaran. Segala upaya dilakukan untuk menghabiskan dana yang tersedia dalam anggaran & dana yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terutama pada akhir tahun anggaran, masih merupakan fenomena yang sering ditemukan hampir pada semua instansi pemerintah yang ada di Indonesia.

Proses penyusunan anggaran seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan bagi masyarakat. Contohnya pidato presiden setiap bulan Agustus tentang nota keuangan dan rancangan APBN selalu menjadi indikator perekonomian untuk tahun berikutnya. Sehingga APBN menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah maupun pihak oposisi. Sehingga dilakukannya indikator ini sebagai gambaran untuk memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Penetapan target indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Metro

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Realisasi Nilai Investasi	Rp 115 Miliar	Rp 120 Miliar	Rp 130 Miliar	Rp 130 Miliar	Rp 135 Miliar	Rp 140 Miliar	Rp 145 Miliar
2	Rasio daya serap tenaga kerja	-	50%	50%	50%	50%	50%	50%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,66	88,86	89,06	89,26	89,46	89,66	89,86

Sumber : Rencana Strategis DPMPTSP Kota Metro Tahun 2021-2026.

Tabel 1.1 menunjukkan Indikator Kinerja Utama dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro selama lima tahun ke depan. Indikatornya meliputi Realisasi Nilai Investasi yang mana pada tahun kesatu mempunyai target capaian senilai Rp 120.000.000.000, tahun kedua dan ketiga mempunyai target capaian senilai Rp 130.000.000.000, tahun keempat mempunyai target capaian senilai Rp 135.000.000.000 dan tahun kelima mempunyai target capaian senilai Rp 140.000.000.000.

Lalu pada indikator kedua yaitu Rasio Daya Serap Tenaga Kerja DPMPTSP Kota Metro mempunyai target capaian selama lima tahun sebesar 50%. Dan untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun kesatu memiliki target capaian sebesar 88,86, tahun kedua memiliki target capaian sebesar 89,06, tahun ketiga memiliki target capaian sebesar 89,26, tahun keempat memiliki target capaian sebesar 89,46 dan pada tahun kelima

memiliki target sebesar 89,66. Yang mana tujuan dari adanya suatu indikator kinerja utama dalam suatu OPD yaitu sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Namun, kondisi ini belum menyentuh masalah penggunaan indikator kinerja pada dokumen anggaran. Sehingga dalam pengelolaan keuangan pada instansi DPMPTSP Kota Metro yakni sering terjadi sisa anggaran dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa pemerintah wilayah telah memutuskan prediksi yakni pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh anggaran belanja. Dalam laporan anggaran bisa saja *surplus*, yakni pendapatan yang terealisasi lebih besar daripada target kinerja ataupun target kinerja lebih besar daripada yang terealisasi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi dalam perencanaan keuangan berbeda dengan yang terealisasi dalam pelaksanaan anggaran. Berikut ini disajikan tabel laporan realisasi anggaran pada DPMPTSP Kota Metro.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DPMPTSP Kota Metro

No.	Tahun	Pagu	Realisasi	Lebih/(kurang)	Persentase
1.	2018	Rp. 5.450.434.655	Rp. 4.943.217.345	Rp. (507.217.310)	90%
2.	2019	Rp. 6.700.427.655	Rp. 5.486.514.239	Rp. (1.213.913.416)	81%
3.	2020	Rp. 5.869.792.556	Rp. 4.893.207.479	Rp. (976.585.077)	83%
4.	2021	Rp. 5.623.653.656	Rp. 5.129.146.836	Rp. (494.506.820)	91%
5.	2022	Rp. 5.990.456.913	Rp. 5.743.265.740	Rp. (247.191.173)	95%

Sumber: Data Diolah (2023)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kusno selaku Fungsional Perencanaan & Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, beliau mengatakan:

“Tabel diatas sudah terlihat masih terdapat sisa anggaran yang belum dimanfaatkan dikarenakan dari sistem perencanaan yang memang belum efektif dan efisien. Maka dari itu terjadinya *surplus* karena memang penganggaran itu review atau melihat riwayat kegiatan tahun sebelumnya sebagai dasar pijakan menyusun laporan keuangan untuk perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang. Sebagai contoh SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang kaitannya dengan dinas luar itu dianggarkan dahulu nilainya, namun realisasinya tidak bisa diprediksi sehingga bisa menyebabkan *surplus*, dan seandainya terjadi kekurangan anggaran pasti akan diperbaiki dalam anggaran perubahan di akhir tahun. Terjadinya penurunan pada tahun 2019 & 2020 disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga hanya setengah dari banyaknya kegiatan yang seharusnya dijalankan, sedangkan adanya peningkatan pada tahun 2021 & 2022 dikarenakan pandemi covid-19 sudah berkurang sehingga dana anggaran bisa dialihkan kembali untuk

berbagai kegiatan. Adapun dampak dari tidak terserapnya anggaran secara signifikan yaitu menurunnya performa dari berbagai aspek yang ada di DPMPTSP Kota Metro, jadi bisa di simpulkan realisasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini belum cukup memuaskan”.⁴

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Wali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang susunan, tugas dan fungsi perangkat daerah Kota Metro. Tugas pokok DPMPTSP Kota Metro yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi. Beberapa jenis kegiatan yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Sistem Layanan Turun Ke Kelurahan Menjemput Izin (Silaturahmi), Layanan Khusus Tenaga Kesehatan, Disabilitas dan Kelompok Rentan (NASI KETAN), Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Program Promosi Penanaman Modal dan lain-lain.

Sebagai Instansi pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro harus dapat mengatur pengelolaan tersebut guna memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan pengelolaan dalam

⁴ Hasil wawancara pra survey dengan Bapak Kusno selaku Fungsional Perencanaan & Keuangan DPMPTSP Kota Metro.

merealisasikan laporan anggaran. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro merupakan salah satu unsur pendukung yang mempunyai tugas menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal dan perizinan, serta berdasarkan visi DPMPTSP Kota Metro yang bertujuan untuk mewujudkan kemudahan berinvestasi dan pelayanan yang prima bagi masyarakat, sehingga peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana “**Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro)**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana realisasi anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam membantu pemecahan masalah yang berkaitan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

E. Penelitian Relevan

Adapun beberapa peneliti terdahulu dengan penelitian yang hampir sama dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Ova Danila & Syukury Abdullah (2018) yang meneliti mengenai Analisis Determinan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Kabupaten Bener Meriah Aceh. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyusun APBK, belum sepenuhnya berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, hal ini tampak pada pengisian pengukuran indikator kinerja pada RKA-SKPK dan DPA-SKPKD belum menggambarkan kaitan yang erat dengan proses pengelolaan pencapaian. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan studi literature dan membandingkannya dengan kondisi pada objek

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi, sistem teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan penghargaan (*reward*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada SKPK di Kabupaten Bener Meriah Aceh.⁵

2. I Putu Dharmanu Yudhartha (2019) dengan judul Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 Kabupaten Bangli Kecamatan Kintamani. Sejumlah desa dan program desa terkena imbas dari keterlambatan dalam menyetor APBDes. Banyak dari para aparat desa yang belum memahami atau mengetahui secara teknis cara dalam menyusun APBDes tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi analisis struktur Kabupaten Bangli belum mencerminkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berbasis kinerja.⁶
3. Yetti Afrida Indra (2019) yang meneliti mengenai Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja di SKPD Provinsi Bengkulu. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara besaran anggaran

⁵ Ova Danila, Ridwan Ibrahim, dan Syukry Abdullah, "Analisis Determinan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Di Kabupaten Bener Meriah, Aceh" (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam: 2018), 82–94.

⁶ I Ketut Winaya & I Putu Dharmanu Yudhartha, "Desa Membangun : Analisis Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Kategori Tertinggal pada Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli)" (JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 2018), 1–8.

dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Penelitian ini menggunakan metode enam variabel bebas (*independen*) dan satu variabel (*dependen*). Operasionalisasi variabel dilakukan dengan melalui instrumentasi yang berbentuk kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan seberapa besar presentase variasi dalam variabel yang diperlukan.⁷

4. Murni Dahlena & Junita Putri Rajana (2020) dengan judul Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran di Provinsi Sumatera Utara. APBD menunjukkan kemampuan potensial suatu daerah dalam mengelola sumber daya daerahnya untuk dijadikan sumber pendapatan dalam rangka pembangunan serta kesejahteraan daerah. Metode yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara sudah baik dan mandiri ditandai dengan besarnya komponen pendapatan asli daerah.⁸
5. Fitriani & Amin Arsyad (2021) meneliti terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Terdapat sejumlah faktor yang berkorelasi atau berpengaruh terhadap pencapaian

⁷ Yetti Afrida Indra, "Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja di SKPD Provinsi Bengkulu" (BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2018), 65–101.

⁸ Murni Dahlena dan Juwita Putri Rajana, "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara" (COSTING: *Journal of Economic, Business and Accounting*, 2020), 456–464.

indikator kinerja anggaran program/kegiatan sesuai dengan serapan anggaran yang telah dirincikan. Setiap realisasi anggaran pada kegiatan akan memberikan nilai kinerja pada suatu program yang telah direncanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dikombinasikan dengan pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja khususnya pada sektor pendidikan dasar wajib Sembilan tahun di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi pada dasarnya sudah cukup baik namun masih harus dilakukan pembenahan-pembenahan.⁹

⁹ Rumlus, Fitriani and Arsyad, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja."(Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial, 2021), 141-154.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah rencana tindakan kuantitatif yang disusun secara metodis untuk dijalankan oleh manajemen selama periode waktu tertentu. Sebuah bisnis menggunakan anggaran sebagai alat untuk pengambilan keputusan.¹

Anggaran juga mencakup prediksi pendapatan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu. Anggaran menguraikan daftar belanja, tetapi dibatasi oleh pendapatan untuk menjaga keseimbangan dan menghindari pemborosan.² Anggaran adalah rencana menyeluruh yang secara eksplisit diartikulasikan dalam istilah kuantitatif, biasanya dalam bentuk uang (perencanaan keuangan), untuk menunjukkan bagaimana sumber daya diperoleh dan digunakan dalam suatu organisasi. Anggaran perlu direncanakan dengan baik, dapat dipahami, menyeluruh dan tepat. Proses penganggaran harus dilakukan secara jujur, transparan dan dilaporkan dengan cara yang sesuai dengan prosedur operasional dan pengendalian organisasi.³

¹ Luh Gede Krisna Dewi “Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali)”, 8.

² Ani Sri Rahayu, “Pengantar Kebijakan Fiskal.” (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 172.

³ Sony Yuwono, et. al., “Penganggaran Sektor Publik.” (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h.27.

Anggaran adalah estimasi yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.⁴ Anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen.⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil makna bahwasanya suatu anggaran haruslah transparasi. Prinsip transparasi anggaran di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Asy-Syuraa (42):38, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: *"dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka". (Q.S. Asy-Syuraa (42):38).*⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa transparasi anggaran adalah wajib, karena sangat berkaitan dengan sifat amanah. Kata "musyawarah" menjelaskan bahwa anggaran yang telah disusun harus dilaporkan dan diumumkan secara jelas dihadapan umum, anggaran bukan hanya demi kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran harus dikaitkan secara hukum, sehingga punya konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁴ Korompot And Poputra, "Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014," 841-48.

⁵ M. Munandar. *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja*. 2000

⁶ Q.S. Asy-Syuraa (42):38

2. Fungsi Anggaran

Keberhasilan perusahaan tidak mungkin tercapai jika tidak memiliki perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan tercermin pada sistem penganggaran yang baik dan terkoordinasi. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian.⁷

Adapun tiga fungsi anggaran yaitu sebagai alat pedoman kerja, alat koordinasi dan alat pengawasan.

- a. Sebagai pedoman kerja. Anggaran sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan tugas dan target-target yang harus dicapai oleh para karyawan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang.
- b. Sebagai alat pengkoordinasian kerja. Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen untuk mengkoordinasikan kerja seluruh bagian dalam perusahaan, agar saling menunjang, saling bekerja sama secara sinergis, dalam rangka menuju sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan menjadi lebih terjamin.
- c. Sebagai alat evaluasi (pengawasan) kerja. Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur, sebagai alat pembandingan untuk menilai kinerja para karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka. Dengan membandingkan antara apa yang tertuang di dalam anggaran, dengan apa yang telah dicapai oleh realisasi kerja karyawan, dapatlah dinilai apakah perusahaan telah

⁷ N. Garrison. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.

sukses bekerja, ataukah kurang sukses bekerja. Apakah perusahaan telah bekerja secara efisien, ataukah bekerja kurang efisien. Dari analisis perbandingan tersebut akan dapat diketahui pula sebab-sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan antara anggaran dengan realisasinya. Dengan demikian dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini akan sangat berguna bagi manajemen untuk menyusun rencana-rencana atau kebijakan-kebijakan di waktu-waktu yang akan datang.⁸

Anggaran mencerminkan adanya unsur keterbatasan, karena keterbatasan suatu sumber daya yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini adalah dana, sehingga diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam aspek mikro fungsi anggaran dalam berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan organisasi dalam bentuk keuangan untuk periode tertentu. Anggaran sebagai alat perencanaan berisi estimasi pendapatan yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dilakukan selama periode anggaran. Anggaran juga berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan organisasi beserta kebutuhan dana yang diperlukan dan target kinerja yang hendak dicapai.

⁸ Ahmad Tomu And Angreyani, "Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pada Toko Phaleng Collection & Custom" (JURNAL ULET, 2021) vol. 5. h. 39-57.

Anggaran berfungsi untuk menyelaraskan perencanaan jangka panjang yang bersifat kualitatif, strategik dan nonkeuangan dengan perencanaan jangka pendek yang lebih bersifat kuantitatif, taktis-operasional dan keuangan. Kecermatan, ketelitian, kelengkapan dan ketepatan dalam perencanaan anggaran sangat penting untuk mencapai keberhasilan organisasi. Sebaliknya kelemahan dalam perencanaan anggaran dapat menimbulkan masalah tahap pelaksanaan yang selanjutnya dapat mengakibatkan kegagalan organisasi mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan target yang ditetapkan.

b. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen agar orang-orang dalam organisasi yang bertanggungjawab atas implementasi strategi, program, kegiatan dan anggaran bekerja sesuai dengan yang direncanakan dalam anggaran (*on budget*) dan tidak menyimpang dari anggaran (*out of budgeting*). Anggaran dapat digunakan untuk memantau tingkat capaian kinerja organisasi (realisasi) dengan target (anggaran) yang ditetapkan selama periode tertentu, misalnya bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Sebagai alat pengendalian, anggaran digunakan untuk menghindari terjadinya pemborosan anggaran, kebocoran dan korupsi anggaran, serta alokasi yang salah sasaran.

Dalam organisasi sector publik, anggaran dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku para pejabat publik dari tindakan yang

menyimpang dan menyalahgunakan anggaran negara. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Ayat 3 Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Bagi pejabat Negara yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran Negara akan dikenai sanksi hukum, sanksi administratif dan tuntutan ganti rugi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan 35 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan.

c. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan berbagai bagian organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Koordinasi anggaran antar berbagai bagian dalam organisasi dimaksudkan untuk:

- 1) Mensinkronkan program kerja dan anggaran unit kerja satu dengan lainnya sehingga dapat dihilangkan duplikasi program dan anggaran.
- 2) Mensinkronkan program kerja dan anggaran unit-unit kerja dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran, target dan strategi organisasi yang dituangkan dalam perencanaan jangka panjang menengah dan jangka pendek yang sudah ditetapkan.

3) Mensinkronkan program kerja dan anggaran unit kerja dengan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek unit kerja bersangkutan.

Selain sebagai alat koordinasi, anggaran juga berfungsi sebagai alat komunikasi dalam organisasi antara atasan dan bawahan dan antar unit kerja. Komunikasi anggaran juga dilakukan antara eksekutif dengan legislatif sebagai pelaksanaan fungsi budget, legislasi dan pengawasan.

d. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat penilaian kinerja. Organisasi atau manajer dinilai kinerjanya berdasarkan realisasi dengan target anggaran. Kinerja pendapatan dinilai baik apabila realisasinya lebih besar dari pada anggarannya, karena anggaran pendapatan merupakan batas minimal atas pendapatan yang harus diperoleh. Sebaliknya kinerja belanja dinilai baik apabila realisasinya tidak melampaui target anggarannya, sebab anggaran belanja merupakan batas maksimal belanja yang boleh dilakukan. Selain kinerja pendapatan dan belanja, kinerja anggaran juga dapat dinilai dari realisasi *surplus/deficit*, pembiayaan serta sisa anggaran.⁹

Sedangkan fungsi anggaran dalam manajemen terdiri dari lima fungsi yaitu sebagai berikut:

⁹ Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik*. 2016: UII Press Yogyakarta.64-66.

- a. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan sebagai hasil dari perundingan antara anggota organisasi yang dominan, yang menunjukkan persetujuan organisasi mengenai tujuan-tujuan operasi untuk masa depan.
- b. Anggaran merupakan *blueprint* bagi perusahaan untuk bertindak yang menggambarkan prioritas manajemen dalam mengalokasikan sumber daya dan menunjukkan bagaimana bagian organisasi diharapkan bekerja dalam mencapai keseluruhan tujuan perusahaan.
- c. Anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai departemen atau divisi dalam organisasi.
- d. Anggaran berusaha mempengaruhi dan memotivasi manajer untuk bertindak efektif dan efisien.
- e. Anggaran sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjukkan area dimana kekuatan dan kelemahan perusahaan.¹⁰

3. Manfaat Anggaran

Anggaran mempunyai banyak manfaat, antara lain:

- a. Meningkatkan motivasi kerja karyawan.
- b. Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana (menghindari pemborosan).
- c. Sebagai alat untuk menilai kinerja karyawan.
- d. Sebagai alat komunikasi internal antar tingkatan manajemen.

¹⁰ Sasongko dan Parulian. 2015. Anggaran. Jakarta: Salmba Empat.

- e. Anggaran menyediakan informasi tentang perencanaan dan realisasinya.¹¹

B. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan pengganti sistem penganggaran lama yaitu sistem *Line Item Budgeting* yang menitik beratkan kepada *Input* bukan *Output* yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan secara nasional. Anggaran berbasis kinerja diterapkan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penganggaran belanja publik.

Prinsip anggaran berbasis kinerja secara teori adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (*output dan outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya.¹²

Pasal 7 Ayat (1) PP 21 Tahun 2004 menyebutkan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diterapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari

¹¹ Chorry Sulistyowati, et. al. *Anggaran Perusahaan: Teori dan Praktika* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), halaman 5.

¹² Bambang Sancoko, et. al. *Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. (Depertemen Keuangan Republik Indonesia, 2015), h.42.

keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. Anggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja sektor publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga seluruh anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparansi kepada masyarakat luas.¹³

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, pengertian anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai.¹⁴ Pendekatan penyusunan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian.¹⁵

Elemen-elemen yang diperlukan untuk menyusun anggaran berbasis kinerja adalah:

¹³ Abdul Halim dan T. Damayanti, Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, ed. 3, 2007), h.37

¹⁴ Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

¹⁵ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (yogyakarta: Andi, 2009),h. 53

1. Visi dan Misi. Merupakan hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam waktu jangka panjang. Sedangkan misi merupakan gambaran bagaimana visi tersebut akan dicapai.
2. Tujuan. Merupakan penjabaran dari visi dan misi. Tujuan digambarkan dalam RPJM nasional yang menunjukkan tahun yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut menggambarkan arah yang jelas dan juga tantangan yang masuk akal.
3. Sasaran. Merupakan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Sasaran yang baik dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria, seperti spesifik, dapat dicapai, terukur, relevan dan ada batasan waktu.
4. Program. Merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi beberapa kegiatan dan disertai dengan target sasaran *output* dan *outcome*.
5. Kegiatan. Merupakan serangkaian pelayanan yang bertujuan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* untuk mencapai suatu program.¹⁶

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Hal itu sejalan pula dengan agenda penguatan

¹⁶ Yulia And Ningsih, "Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh," Vol. 5.

pengawasan yang mewajibkan dilakukannya *review* atas pencapaian kinerja utama instansi pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.¹⁷

C. Faktor-faktor Keberhasilan Implementasi Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja

Secara teoritis, kepemimpinan (*leadership*) merupakan hal yang sangat penting dalam manajerial, karena kepemimpinan yang baik maka proses manajemen berjalan dengan baik dan pegawai akan bergairah dalam melakukan tugasnya, faktor kepemimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan kinerja, baik pada tingkat kelompok maupun dalam tingkat organisasi. Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula.¹⁸

Reformasi administrasi perlu ditujukan pada penyempurnaan administrasi untuk mendukung pembangunan daerah. Penyempurnaan administrasi secara berkelanjutan berupa penyiapan instrument pengukuran anggaran berbasis kinerja secara terus menerus melalui penyempurnaan instrument pengukuran anggaran berbasis kinerja yang sudah ada yaitu standar pelayanan minimal, standar analisis belanja, target kinerja dan standar biaya

¹⁷ “Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Kota Metro Tahun 2022.”

¹⁸ Santrinita.Trh.Jumame, Herman karamoy dan Agus T Poputra. 2015. FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Di Pemerintah Kota Sorong. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Yogyakarta. Vol 2 No 2, H. 104.

merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyusunan APBD berbasis kinerja. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 100 Ayat (2) dan (3).¹⁹

Sumber daya yang cukup yaitu upaya penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas implementasi anggaran berbasis kinerja sumber daya yang cukup disini adalah termasuk uang, waktu dan orang yang akan melakukan proses penganggaran berbasis kinerja. Ada dua elemen mendasar yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja.²⁰

Reward dan *Punishment* merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya dalam hal implementasi anggaran berbasis kinerja ini perlu dijaga konsistensi perencanaan dengan penganggaran dan pemberian *reward* dan *punishment* yang jelas bagi satuan kerja perangkat daerah.²¹

D. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah Laporan yang berisi tentang laporan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggarannya. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

²⁰ Santrinita.Trh.Jumame, Herman karamoy dan Agus T Poputra. 2015. FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Di Pemerintah Kota Sorong., 104

²¹ *Ibid.*

mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian atas sumberdaya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber yang digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Laporan realisasi anggaran adalah Rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Berdasarkan definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran adalah merupakan suatu serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan.²³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02 laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas. struktur laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi antara lain :

1. Pendapatan

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun

²² Dona And Lestari, "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku," 137.

²³ Rudianto. (2009). Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: Grasindo.

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2. Belanja

- a. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. *Surplus* atau *Deficit*

Surplus atau defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

5. Pembiayaan (*Financing*)

Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,

yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.²⁴

E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat dan menghasilkan potensi-potensi yang optimal jika daerah mampu mengelola dengan baik. pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun sumber-sumber PAD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah.

2. Hasil Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dari pendapat-pendapat para ahli, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh

²⁴ Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02

daerah baik langsung maupun tidak langsung. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yaitu:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah;
 - b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
 - c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menikmati jasa yang disediakan daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja dan dimaksudkan untuk dikuasai dan di pertanggungjawabkan sendiri.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Pendapatan bunga
- c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.²⁵

²⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157 Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.

F. *Value For Money*

Value for money adalah konsep pengukuran kinerja yang memberikan informasi terhadap anggaran atau dana yang segala unsurnya berbentuk satu kesatuan dari *input*, *output*, dan *income*. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisien, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengukuran kinerja *value for money* memberikan informasi terhadap fungsi-fungsi akuntabilitas untuk mendorong tanggungjawab manajer dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas. Indikator kinerja memberikan manfaat kepada pihak internal maupun pihak eksternal dalam memberikan informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik sehingga menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Dalam organisasi publik konsep *value for money* di dasarkan pada tiga elemen utama yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomi

Ekonomi dinyatakan dalam satuan moneter yang dimana merupakan perbandingan *input* dengan *input value*. Ekonomi juga merupakan perolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas untuk menentukan harga terendah, *input* dalam sumber daya alam digunakan untuk pelaksanaan kebijakan, program, maupun aktivitas.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja *value for money* dalam efisiensi dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Efisiensi alokasi yaitu terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal.
 - b. Efisiensi teknis atau manajerial yaitu terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat *output* tertentu.
3. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat pencapaian dari hasil program dengan target yang telah ditetapkan yang pada dasarnya merupakan perbandingan dari *outcome* dan *output*. Rasio efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.²⁶

Manfaat implementasi konsep *value for money* pada pemerintah yaitu:

- a. Meningkatkan efektifitas pelayanan public, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran..
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*.
- d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- e. Meningkatkan kesadaran akan ruang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

²⁶ Mahmudi, (2013), Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta

Secara garis besar pelaksanaan *value for money* pada dasarnya hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien pada dasarnya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya sedangkan efektivitas pada dasarnya berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.²⁷

²⁷ Maharani And Sari, "Konsep Value For Money Untuk Pengukuran Kinerja Pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang," 99.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu.¹

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.² Lokasi pada penelitian ini berada di Pemerintah Daerah Kota Metro tepatnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro yang beralamatkan di Jl. A.H Nasution No. 7 Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat Kota Metro, Lampung.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan yang sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2020), 2.

² Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 28.

serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data/informasi yang bersifat sewajarnya.³

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁴

Berdasarkan sifat penelitian di atas, maka penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual bagaimana realisasi anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada DPMPTSP Kota Metro didasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian kualitatif ini terbagi menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dari sumber data tersebut bermanfaat sebagai acuan untuk memilah data yang akan di jadikan sebagai bahan penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pelaku peristiwa itu sendiri, dengan pertanyaan yang bersifat umum yang bertujuan untuk mengungkap data.⁵ Informasi primer dalam penelitian ini didapat dari hasil

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, 9.

⁴ Kountur, *Metodologi Penelitian*, 53.

⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 104.

wawancara secara langsung ke pegawai DPMPTSP Kota Metro. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi serta data yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini peneliti mengambil teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.⁶ Berikut ini disajikan beberapa narasumber yang akan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Tabel 3.1
Narasumber

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Agus Purnomo, S.E	Kepala Subbag Umum & Kepegawaian
2.	Bapak Kusno	Fungsional Perencanaan & Keuangan
3.	Ibu Dra. Leny Herlina	Koordinator Kegiatan Bidang Pelayanan dan Perizinan
4.	Bapak Antony, S.T	Koordinator Kegiatan Bidang Penanaman Modal
5.	Ibu Kori Auliana, S.IP	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
6.	Ibu Ika Ariani	Pejabat Penata Urusan Keuangan

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti lewat orang lain atau dokumen. Informasi data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari DPMPTSP Kota Metro. Berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari tahun 2018 – 2022, Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target dan realisasi tahun 2021 & 2022 serta Capaian PAD dari sektor perizinan berupa perizinan

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, 219.

dan non perizinan di tahun 2016-2020 yang kemudian Informasi ini digunakan sebagai bahan pendukung pada penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data.⁷ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam rangka untuk memperoleh data yang alami dan obyektif dilokasi penelitian, hendaklah seorang peneliti menggunakan bermacam-macam metode pengumpulan data untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode wawancara

Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, yaitu pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis. Oleh sebab itu pertanyaan disusun secara ketat. Wawancara terstruktur pada umumnya digunakan jika seluruh sampel penelitian dipandang memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Keuntungan wawancara

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, 137.

terstruktur ini adalah tidak dilakukannya pendalaman pertanyaan yang memungkinkan adanya dusta bagi informan yang di wawancarai.⁸

Pada teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti sasaran utama pada wawancara ini yaitu kepada bagian sekretariat dan kelompok jabatan fungsional pada DPMPTSP Kota Metro yang bertujuan untuk mendapatkan berupa data yang dijadikan untuk bahan dalam penelitian ini.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan dimana mengumpulkan data dalam bentuk visual seperti buku, dokumen-dokumen, maupun jurnal. Secara pengetahuan dokumentasi juga diartikan sebagai pengumpulan dalam bentuk foto.

Berdasarkan penjelasan tersebut metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data-data tentang sejarah singkat berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, struktur kepengurusan dan visi misi DPMPTS Kota Metro, dan proses penginputan pada saat menyusun laporan realisasi anggaran.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini

⁸ Dr. Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books. 2014.

adalah triangulasi data. Triangulasi data yaitu teknik yang lebih mengutamakan efektifitas hasil penelitian.⁹

Ada beberapa triangulasi yang digunakan yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data Laporan Keuangan yang telah disusun oleh DPMPTSP Kota Metro. yang diperoleh kemudian di cek kembali dengan sumber data lainnya. Data yang telah di analisis ataupun di cek oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber pegawai DPMPTSP Kota Metro dengan teknik yang berbeda contohnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan dokumentasi pada saat penginputan laporan keuangan, jika dari pengecekan tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau lainnya untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data dalam katagori, menjabarkan kedalam

⁹ M. Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 169.

unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁰

Teknik yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif lapangan yaitu analisis data yang berupa informasi, uraian dan bentuk prosa kemudian berkaitan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang didapatkan berupa uraian-uraian dan keterangan didapat dari kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti.

Aktivitas dalam analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Langkah-langkah analisis yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, 89.

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara pada pegawai DPMPTSP Kota Metro selanjutnya akan diolah menggunakan metode analisis kualitatif lapangan karena data yang diperoleh merupakan keterangan yang di analisa menggunakan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan penalaran atau berfikir rasional yang berasal dari laporan realisasi anggaran dan sumber daya manusia yang berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pemerintah Kota Metro yang berada di Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri sumber-sumber pendapatan daerah untuk kemajuan Kota Metro Lampung. Provinsi Lampung memiliki letak yang strategis yaitu sebagai gerbang pulau Sumatera dimana menjadi jalur penyaluran distribusi baik berupa hasil pertanian, peternakan dan perkebunan.

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, saat ini Kota Metro memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Di Dinas ini masyarakat dapat mengurus berbagai perizinan secara cepat, tepat, transparan dan mudah.

Pemerintah Kota Metro saat ini sudah membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) yang diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan di dalam satu lokasi. Selain itu masyarakat diberi kesempatan mudah melakukan pelayanan perizinan dengan melalui aplikasi Si Cantik, OSS Indonesia dan yang terbaru yaitu Nasi Ketan.

1. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

a. Visi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

“Kemudahan Berinvestasi dan Pelayanan Perizinan Yang Prima”

“Investasi” adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

“Pelayanan Perizinan” adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat maupun kebutuhan dasar masyarakat dibidang perizinan yang merupakan pengendalian dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

“Prima” dimaksudkan memenuhi standar kepuasan masyarakat yang meliputi transparan, efisien, efektif dan tepat waktu serta profesionalisme petugas perizinan dalam melaksanakan pelayanan dibidang perizinan.

- b. Misi yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

Misi 1 : Memberikan Kemudahan Dan Transparansi Kepada Masyarakat. Peningkatan Minat Investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan baik yang meyangkut tentang biaya hidup maupun proses penerbitan izin.

Misi 2 : Menyederhanakan Prosedur dan Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Investasi. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme penerbitan izin merupakan faktor utama

terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Semua kendala yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat akan proses penerbitan izin akan terjawab manakala prosedur dan mekanisme perizinan dapat disederhanakan dan dipermudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan diwujudkan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Misi 3 : Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan penanaman modal. Peningkatan pelayanan perizinan tak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana pelayanan itu sendiri. Kemudahan dan kenyamanan proses pelayanan dan penerbitan izin serta pelayanan penanaman modal sangat bergantung dan fasilitas sarana prasarana yang mendukung kegiatan operasional penerbitan perizinan. Hal inilah yang mendasari diharuskannya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna mendukung kegiatan pembangunan Kota Metro.

Misi 4 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Peningkatan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal akan sangat membantu terwujudnya pembangunan Kota Metro sesuai dengan visi Kota Metro yang telah ditetapkan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan merupakan awal dari partisipasi dalam pembangunan. Secara sengaja atau tidak di sengaja kesadaran akan penting perizinan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang paling riil dalam menyokong mewujudkan visi Kota Metro.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi.

Sedangkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro yaitu:

- a. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.

- c. Pembinaan pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

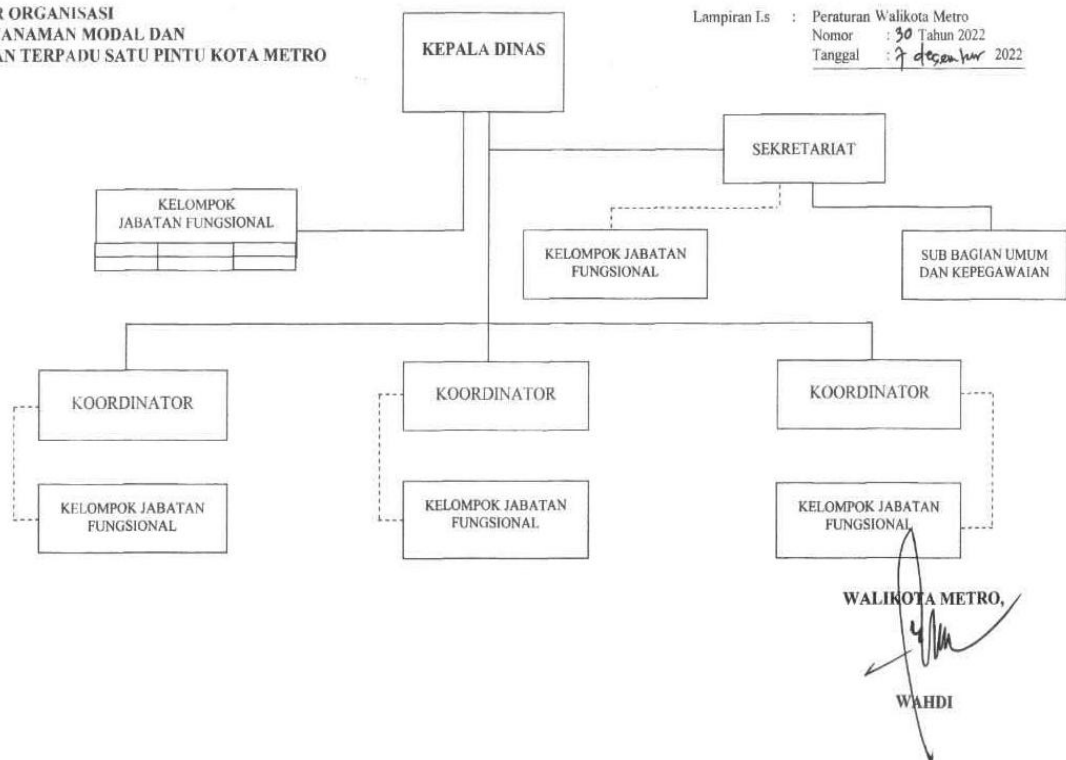
3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional (JF)

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO**

Lampiran Ls : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 30 Tahun 2022
Tanggal : 7 Desember 2022



Gambar 4.1
Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

4. Tugas Pokok Masing-masing Bagian Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal. Pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan secara terpadu;
- (2) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan secara terpadu;
- (3) Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan secara terpadu;
- (4) Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan secara terpadu;
- (5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan secara terpadu; dan
- (6) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan keuangan dan aset, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penatausahaan keuangan;
- d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sebagai Berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan urusan umum, rumah tangga dinas dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;
- c. Melaksanakan penatausahaan kearsipan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- e. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan dan pemanfaatan aset dinas;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- g. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas urusan umum dan kepegawaian;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan,

evaluasi dan pelaporan dan penatausahaan keuangan dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan penatausahaan keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan dokumen perjalanan dinas;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan;
- d. Melaksanakan pelaporan terhadap program kerja yang telah dilaksanakan;
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan keuangan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan bidang instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koordinator Jf Dpmtsp Kota Metro

Koordinator JF Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kelompok Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan promosi, kerjasama, pengendalian pengawasan dan

pengembangan penanaman modal, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan
- d. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koordinator JF Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, mengkoordinasikan kelompok Substansi yang terdiri dari:

- a. Kelompok JF Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim/Penanaman Modal Mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dan pengembangan iklim penanaman modal dengan penjabaran sebagai berikut:
 - 1) Melakukan perencanaan penanaman modal daerah;
 - 2) Melakukan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;
 - 3) Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Kelompok JF Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan rencana promosi terhadap penanaman modal dengan penjabaran tugas sebagai berikut:
- 1) Melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - 2) Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - 3) Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Hasil Penelitian

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja pada DPMPTSP Kota Metro

Anggaran adalah rencana tindakan kuantitatif yang disusun secara metodis untuk dijalankan oleh manajemen selama periode waktu tertentu. Sebuah bisnis menggunakan anggaran sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan pengganti sistem penganggaran lama yaitu *sistem Line Item Budgeting* yang menitik beratkan kepada *input* bukan *output* yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan secara nasional. Anggaran berbasis kinerja diterapkan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penganggaran belanja publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kori Auliana, S.IP Selaku sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro menerangkan terkait capaian dari indikator kinerja utama, target, strategi serta pemenuhan DPMPTSP Kota Metro dari target atau keinginan Wali Kota Metro yaitu:

“Secara umum berdasarkan hasil penilaian kinerja terhadap sasaran strategis/indikator kinerja utama dan sasaran program itu kalau di simpulkan terkait kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro itu sudah cukup baik. Nah untuk meningkatkan capaian kinerja strategi utama yang akan kita lakukan itu seperti optimalisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) menuju MPP Digital dalam rangka mendorong peningkatan dalam indikator kinerja utama dari DPMPTSP Kota Metro”.¹

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada DPMPTSP Kota Metro menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yakni bagaimana realisasi anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja. Realisasi Anggaran yang diterapkan DPMPTSP Kota Metro telah terjadi perubahan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Agus Purnomo, S.E Selaku Kepala Subbag Umum & Kepegawaian, sebagai berikut:

“DPMPTSP Kota Metro memiliki anggaran belanja yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah pusat, namun jika anggaran belanja tidak terealisasi maka tahun anggaran yang akan datang kegiatan tersebut dievaluasi pelaksanaannya dan dialihkan ke kegiatan lain yang lebih diutamakan kegiatannya”.²

¹ Wawancara dengan Ibu Kori Auliana, S.IP Selaku Sekretaris DPMPTSP Kota Metro, pada hari Selasa 22 Agustus 2023 pukul 10:15 WIB di Mal Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Metro.

² Wawancara kepada Bapak Agus Purnomo, S.E selaku Kepala Subbag Umum & Kepegawaian, pada hari Jum'at 19 Mei 2023 Pukul 13:47 WIB di Aula Mal Pelayanan Publik Kota Metro.

Begitupun juga wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Kusno Selaku Bagian Fungsional Perencanaan & Keuangan, bahwasanya beliau mengatakan:

“DPMPTSP Kota Metro ini salah satu OPD yang terdapat di Kota Metro Lampung dan pastinya memiliki sebuah anggaran dari pemerintah pusat yang tentunya sudah disetujui. Lalu jika nyatanya dari sebuah anggaran yang didapat belum terealisasi maka di tahun yang akan datang tentunya kegiatan yang memiliki anggaran akan di evaluasi pelaksanaannya dan akan diutamakan ke kegiatan lainnya”.³

Dalam penyusunan anggaran pada dasarnya DPMPTSP Kota Metro sudah menyajikan informasi seperti realisasi belanja, surplus, defisit dan menyusun laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Namun, jika dirujuk dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa PSAP No. 02 dalam laporan realisasi anggaran harus menyajikan beberapa pos-pos seperti pos pendapatan, belanja, transfer, penerimaan pembiayaan, pengeluaran, surplus/defisit, sedangkan dalam laporan realisasi anggaran pada DPMPTSP Kota Metro tidak menyajikan pos pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ika Ariani Selaku Pejabat Penata Urusan Keuangan, beliau mengatakan:

“Ya memang pada DPMPTSP ini tidak menyajikan pos pendapatan pada laporan realisasi anggaran, karena untuk pos pendapatan seutuhnya disusun oleh BPKAD Kota Metro. Terus DPMPSTP Kota Metro juga tidak menyajikan pos-pos transfer ya karena DPMPTSP Kota Metro tidak melakukan transfer untuk tahun berjalan dan juga tidak menyajikan pembukuan mata uang asing

³ Wawancara kepada Bapak Kusno Selaku Bagian Fungsional Perencanaan & Keuangan, pada hari Senin 26 Juni 2023 pukul 11:22 WIB di Ruang Umum & Kepegawaian DPMPTSP Kota Metro.

dalam rupiah dikarenakan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran tidak terjadi transaksi dalam mata uang asing”.⁴

Selanjutnya hasil dari wawancara dengan Ibu Dra. Leny Herlina selaku Koordinator Kegiatan pada bidang pelayanan mengungkapkan bahwa:

“Target dari IKU yang dibebankan si target capaiannya itu dari semua berkas yang masuk ke pelayanan, nah itu targetnya harus terealisasi dengan apa yang disampaikan ke bidang pelayanan. Lalu kebetulan pada bidang pelayanan untuk semua rencana yang sudah kita persiapkan setiap tahun ya alhamdulillah sudah terealisasi. Jadi memang untuk anggaran itu sendiri perlu di matangkan dahulu rencananya itu agar supaya satu tahun atau capaian akhirnya itu terealisasi semua. Nah kalau dampaknya jika anggaran tidak terealisasi secara efektif itu salah satunya mengakibatkan penurunannya performa kinerja dikarenakan minim nya kegiatan”.⁵

Sama halnya dengan Ibu Dra. Leny Herlina, Koordinator Kegiatan pada bidang penanaman modal Bapak Antomy, S.T beliau berkata bahwa:

“Dari bidang penanaman modal selama lima tahun ini alhamdulillah sudah tercapai target dari IKU. Salah satu upaya kita dalam mencapai target tersebut itu kita melakukan promosi tentang Kota Metro itu sendiri agar supaya menarik para investor. Lalu dampak jika anggaran tidak terealisasi pada bidang penanaman modal itu akan dijadikan evaluasi untuk tahun berikutnya atau bisa juga anggaran yang belum bisa di manfaatkan itu di pindah ke bidang yang lain”.⁶

Berikut ini disajikan tabel realisasi capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro untuk Tahun 2021 dan Tahun 2022.

⁴ Wawancara kepada Bu Ika Ariani Handayani selaku Staff Pejabat Penata Urusan Keuangan pada hari Rabu 12 April 2023 pukul 09:55 WIB di Ruang Umum & Kepegawaian DPMPTSP Kota Metro.

⁵ Wawancara dengan Ibu Dra. Leny Herlina selaku Koordinator Kegiatan Bidang Pelayanan, pada hari Kamis 14 September 2023 pukul 11:50 WIB di Ruang Bidang Pelayanan DPMPTSP Kota Metro.

⁶ Wawancara dengan Bapak Antomy, S.T selaku Koordinator Kegiatan Bidang Penanaman Modal, pada hari Kamis 14 September 2023 pukul 13:27 WIB di Ruang Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kota Metro.

Tabel. 4.1
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Nilai Investasi	Rp 120 Miliar	Rp 237,37 Miliar	197,80
2.	Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	50	4,03	8,06
3.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,86	84,77	95,40

Sumber: Rencana Strategis DPMPTSP Kota Metro

Tabel. 4.2
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro Tahun 2021

No.	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal <i>(Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota)</i>	Rp 123.224.200	Rp 115.873.100	94,03
2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal <i>(Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegritas pada tingkat daerah Kabupaten/Kota)</i>	Rp 46.492.100	Rp 45.675.600	98,24
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal <i>(Pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota)</i>	Rp 355.791.000	Rp 348.299.470	97,89

Sumber: Rencana Kerja DPMPTSP Kota Metro

2. Realisasi Nilai Investasi Tahun 2021

Sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pada urusan penanaman modal maka peningkatan realisasi investasi merupakan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan penanaman modal. Peningkatan realisasi investasi merupakan salah satu komponen yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Metro. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi Investasi” diukur dengan Indikator Kinerja Realisasi Nilai Investasi. Realisasi capaian kinerja atas target kinerja Realisasi Penanaman Modal tercapai 197,80% dengan capaian nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp 237.370.000.000 dari target Rp 120.000.000.000. Adanya kenaikan capaian kinerja realisasi investasi ini didorong oleh adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi/Online Single Submission RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) sehingga dapat memudahkan perolehan data realisasi investasi yang terintegritas dengan pusat serta telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pendukung tentang perizinan berusaha yang tujuan utamanya adalah menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing berdampak secara tidak langsung dalam meningkatkan capaian realisasi investasi di Kota Metro. Pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui **Kegiatan Penetapan**

pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Realisasi anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar Rp 115.873.100,- dari pagu anggaran sebesar Rp 123.224.200,- atau terealisasi sebesar 94,03%. Penggunaan anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar 5,97%.

Faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi Realisasi Nilai Investasi yaitu:

- a. Masih terdapat potensi investasi yang tumpang tindih dalam sistem Online Single Submission (OSS) RBA yang disebabkan oleh data investasi per KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) setiap 1 (satu) perusahaan yang mempengaruhi validitas data realisasi investasi.
- b. Masih kurangnya ketersediaan lahan bagi calon investor untuk membuka usaha dengan skala menengah dan besar di Kota Metro.

Faktor-faktor pendorong Realisasi Nilai Investasi yaitu:

- a. Adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas/Online Single Submission RBA sehingga dapat memudahkan perolehan data realisasi investasi yang terintegritasi.

- b. Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pendukung tentang perizinan berusaha yang tujuan utamanya adalah menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing berdampak secara tidak langsung dalam meningkatkan capaian realisasi investasi di Kota Metro.

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2021

Pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** yang dilaksanakan melalui kegiatan **Pengelolaan daya dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegritasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota**. Realisasi capaian kinerja atas target kinerja Rasio Daya Serap Tenaga kerja hanya tercapai 8,06% dengan kinerja rasio daya serap tenaga kerja sebesar 1:4,03 dari target 1:50. Sangat rendahnya capaian kinerja tersebut dikarenakan terdapat kesalahan dalam menentukan target kinerja yang disebabkan indikator kinerja Rasio Daya Serap Tenaga Kerja baru dijadikan salah satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Rencana Strategis 2021-2026 dan kurangnya data yang valid terkait dengan tenaga kerja terserap. Berdasarkan hasil capaian tersebut, maka akan dilakukan revisi terkait target capaian tersebut melalui revisi Renstra DPMPTSP Kota Metro 2021-2026.

Realisasi anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar Rp 45.675.600,- dari pagu anggaran sebesar Rp 46.492.100,- atau

terrealisaasi sebesar 98,24%. Penggunaan anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut adanya efisiensi penggunaan sumber daya sumber daya sebesar 1,76%.

Faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi Rasio Daya Serap Tenaga Kerja yaitu:

- a. Kesulitan untuk mendapatkan data valid jumlah tenaga kerja yang terdaftar secara resmi dalam setiap usaha yang telah didaftarkan pada OSS pada OPD yang mengampu urusan ketenagakerjaan.
- b. Masih terdapat potensi data jumlah tenaga kerja yang tumpang tindih dalam sistem Online Single Submission (OSS) RBA yang disebabkan oleh data tenaga kerja per KBLI setiap 1 (satu) perusahaan yang mempengaruhi validitas data tenaga kerja.

Faktor-faktor pendorong Rasio Daya Serap Tenaga Kerja yaitu:

- a. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang menjadi payung hukum bagi DPMPTSP Kota Metro dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang penanaman modal.
- b. Adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas/Online Single Submission RBA sehingga dapat memudahkan perolehan data realisasi investasi yang terintegritasi.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

Pada tahun 2021 telah dilakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 400 orang pengguna layanan. Realisasi capaian kinerja atas target Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 tercapai 95,40% dengan capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,77 dengan kriteria Baik dari target nilai IKM 88,86.

Faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu:

- a. Sarana dan prasarana pelayanan yang masih belum memadai.
- b. Masih terdapat kendala teknis dalam pengisian Survey Kepuasan Masyarakat secara elektronik.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi komitmen pengurusan izin sehingga pelayanan masih dianggap sulit.

Faktor-faktor pendorong Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu:

- a. Adanya layanan pendampingan bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mendaftarkan usahanya melalui OSS RBA.
- b. Adanya layanan pengaduan melalui berbagai sarana baik secara manual dan elektronik yang menjadi wadah untuk menampung segala keluhan dan masukan pengguna layanan dalam memperoleh layanan.

Realisasi anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar Rp 348.299.470 dari pagu anggaran sebesar Rp 355.791.000 atau terealisasi sebesar 97,89%. Penggunaan anggaran guna pencapaian kinerja

sasaran tersebut terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,11%.

Tabel. 4.3
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Nilai Investasi	Rp 125 Miliar	Rp 247,10 Miliar	197,68
2.	Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	50	20,32	40,42
3.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,06	89,26	100,22

Sumber: Rencana Strategis DPMPTSP Kota Metro.

Tabel. 4.4
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro Tahun 2022

No.	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota)	Rp 335.019.500	Rp 296.398.853	88,47
2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Pengelolaan data dan informasi)	Rp 50.734.800	Rp 49.548.506	97,66

	<i>perizinan dan non perizinan yang terintegritas pada tingkat daerah Kabupaten/Kota)</i>			
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal <i>(Pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota)</i>	Rp 350.071.000	Rp 348.558.150	99,57

Sumber: Rencana Kerja DPMPSTP Kota Metro

5. Realisasi Nilai Investasi Tahun 2022

Sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pada urusan penanaman modal maka peningkatan realisasi investasi merupakan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan penanaman modal. Peningkatan realisasi investasi merupakan salah satu komponen yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Metro. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi Investasi” diukur dengan Indikator Kinerja Realisasi Nilai Investasi. Realisasi capaian kinerja atas target kinerja Realisasi Penanaman Modal tercapai 197.68% dengan capaian nilai investasi tahun 2022 sebesar Rp 247.100.000.000 dari target Rp 125.000.000.000. Adanya kenaikan capaian kinerja realisasi investasi ini di dorong oleh adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas/Online Single Submission RBA sehingga dapat memudahkan perolehan data realisasi investasi yang terintegritas dengan pusat serta

telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pendukung tentang perizinan berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing berdampak secara tidak langsung dalam meningkatkan capaian realisasi investasi di Kota Metro. Pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan **program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** yang dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- b. Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota.

Realisasi anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar Rp 296.398.853,- dari pagu anggaran sebesar Rp 335.019.500,- atau terealisasi sebesar 88,47%. Penggunaan anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar 11,53%.

Faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi Realisasi Nilai Investasi yaitu:

- a. Masih terdapat potensi investasi yang tumpang tindih dalam sistem Online Single Submission (OSS) RBA yang disebabkan oleh data investasi per KBLI setiap 1 (satu) perusahaan yang mempengaruhi validitas data realisasi investasi.

- b. Masih kurangnya ketersediaan lahan bagi calon investor untuk membuka usaha dengan skala menengah dan besar di Kota Metro.

Faktor-faktor pendorong Realisasi Nilai Investasi yaitu:

- a. Adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas/Online Single Submission RBA sehingga dapat memudahkan perolehan data realisasi investasi yang terintegritasi.
- b. Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pendukung tentang perizinan berusaha yang tujuan utamanya adalah menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing berdampak secara tidak langsung dalam meningkatkan capaian realisasi investasi di Kota Metro.

6. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2022

Pencapaian kinerja ini di dukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan daya dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegritasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota. Realisasi capaian kinerja atas target kinerja Rasio Daya Serap Tenaga kerja hanya tercapai 40,42% dengan kinerja rasio daya serap tenaga kerja sebesar 1:20,2 dari target 1:50. Masih rendahnya capaian kinerja tersebut dikarenakan masih belum optimalnya pelaporan pelaksanaan kegiatan

penanaman modal oleh pelaku usaha melalui LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) sehingga berdampak pada ketersediaan data serapan tenaga kerja.

Realisasi anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar Rp 49.548.506,- dari pagu anggaran sebesar Rp 50.734.800,- atau terealisasi sebesar 97,66%. Penggunaan anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,34%.

Faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi Rasio Daya Serap Tenaga Kerja yaitu:

- a. Masih terdapat potensi data jumlah tenaga kerja yang tumpang tindih dalam sistem Online Single Submission (OSS) RBA yang disebabkan oleh data tenaga kerja per KBLI setiap 1 (satu) perusahaan yang mempengaruhi validitas data tenaga kerja.
- b. Masih kurangnya kesadaran investor/pelaku usaha dalam membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga sulit dalam mendapatkan realisasi serapan tenaga kerja.

Faktor-faktor pendorong Rasio Daya Serap Tenaga Kerja yaitu:

- a. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang menjadi payung hukum bagi DPMPTSP Kota Metro dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang penanaman modal.

- b. Adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas/Online Single Submission RBA sehingga dapat memudahkan perolehan data realisasi investasi yang terintegritasi.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

Pada tahun 2022 telah dilakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 400 orang pengguna layanan. Realisasi capaian kinerja atas target Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 tercapai 100,22% dengan capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89,26 dengan kriteria Baik dari target nilai IKM 89,06.

Realisasi anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar Rp 348.558.150,- dari pagu anggaran sebesar Rp 350.071.000,- atau terealisasi sebesar 99,57%. Penggunaan anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,43%.

Faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu:

- a. Sarana dan prasarana pelayanan yang masih belum memadai.
- b. Masih terdapat kendala teknis dalam pengisian Survey Kepuasan Masyarakat secara elektronik.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi komitmen pengurusan izin sehingga pelayanan masih dianggap sulit.

Faktor-faktor pendorong Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu:

- a. Adanya layanan pendampingan bagi pelaku usaha khususnya UMKM dalam mendaftarkan usahanya melalui program SILATURAHMI (Sistem Layanan Turun Kelurahan Menjemput Izin).
- b. Adanya layanan pengaduan melalui berbagai sarana baik secara manual dan elektronik yang menjadi wadah untuk menampung segala keluhan dan masukan pengguna layanan dalam memperoleh layanan di DPMPTSP Kota Metro.

C. Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini, sistem penganggaran berbasis kinerja merupakan salah satu penyusunan anggaran yang menekankan pada hasil kerja. Dimana sistem ini digunakan untuk mengaitkan langsung antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil yang ditentukan dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang telah dilakukan. Anggaran yang disusun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro berdasarkan pada perencanaan kinerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada program kegiatan yang akan dilakukan dengan menentukan indikator yang ingin dicapai. Anggaran berbasis kinerja difokuskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro. Hal ini dilakukan guna menganalisis anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja apakah telah dilakukan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan konsep *Value For Money* yang sudah dijelaskan pada landasan teori terdapat tiga elemen utama yang dapat digunakan sebagai analisis peneliti yaitu:

1. Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dalam struktur laporan realisasi anggarannya tidak terdapat pos pendapatan. Hal itu dikarenakan pendapatan asli daerah yang meliputi sektor perizinan langsung dikelola oleh BPKAD Kota Metro. Meskipun demikian, kinerja dari DPMPTSP Kota Metro sudah baik dengan membantu BPKAD Kota Metro dalam menerbitkan perizinan dan non perizinan serta merealisasikan retribusi dari pendapatan asli daerah Kota Metro sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Telah diterbitkan dan Realisasi PAD dari Sektor Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Izin	Target Retribusi	Realisasi Retribusi	%
1.	2016	3.818	Rp 1.741.000.000	Rp 2.748.087.209	151,37
2.	2017	3.624	Rp 2.429.200.000	Rp 2.435.562.341	107,75
3.	2018	1.795	Rp 1.901.500.000	Rp 1.572.434.725	82,69
4.	2019	898	Rp 1.900.000.000	Rp 989.679.772	52,09
5.	2020	658	Rp 1.900.000.000	Rp 1.989.269.009	102,01

Sumber: Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

Dari tabel 4.5 diatas dapat diketahui data perizinan dan non perizinan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Yang mana pada tahun 2016 data jumlah izin yang masuk ke dalam DPMPTSP sebanyak 3.624 dengan target retribusi daerah Kota Metro sebesar Rp 1.741.000.000 dan telah tercapai realisasi sebesar Rp 2.748.087.209 dengan persentase

mencapai 151,37%. Pada tahun 2017 data jumlah izin yang masuk ke dalam DPMPTSP sebanyak 3.624 dengan target retribusi sebesar Rp 2.429.200.000 dan telah tercapai realisasi sebesar Rp 2.435.562.341 dengan persentase mencapai 107,75%. Pada tahun 2018 data jumlah izin yang masuk ke dalam DPMPTSP sebanyak 1.795 dengan target retribusi sebesar Rp 1.901.500.000 dan telah tercapai realisasi sebesar Rp 1.572.434.725 dengan persentase mencapai 82,69%. Pada tahun 2019 data jumlah izin yang masuk ke dalam DPMPTSP sebanyak 898 dengan target retribusi sebesar Rp 1.900.000.000 dan telah tercapai realisasi sebesar Rp 989.679.772 dengan persentase mencapai 52,09%. Dan pada tahun 2020 data jumlah izin yang masuk ke dalam DPMPTSP sebanyak 658 dengan target retribusi sebesar Rp 1.900.000.000 dan telah tercapai realisasi sebesar Rp 1.989.269.009 dengan persentase mencapai 102,01%.

Selain itu, anggaran yang telah didapatkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro digunakan sepenuhnya untuk belanja operasi dan belanja modal yang rinciannya terdapat pada struktur Laporan Realisasi Anggaran. Meskipun demikian dalam anggaran yang sudah di targetkan masih terdapat *surplus* dari tahun ke tahun.

2. Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menganalisis bahwa pengukuran kinerja *value for money* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro sudah berjalan dengan efisien

berdasarkan laporan realisasi anggaran dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ini ditunjukkan penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu, yang dapat dilihat dari belanja operasi dan belanja modal pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Uraian Struktur Laporan Realisasi Anggaran

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	%
TAHUN 2018					
1.	BELANJA OPERASI				
	- Belanja Pegawai	Rp 3.872.142.555	Rp 3.411.732.752	Rp (460.418.803)	88
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.330.697.750	Rp 1.283.899.234	Rp (46.798.507)	96
2.	BELANJA MODAL				
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 247.594.350	Rp 247.594.350	Rp 0,00	100
TAHUN 2019					
1.	BELANJA OPERASI				
	- Belanja Pegawai	Rp 4.905.586.455	Rp 3.744.482.358	Rp (1.161.104.097)	76
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.383.079.600	Rp 1.334.159.481	Rp (48.920.119)	96
2.	BELANJA MODAL				
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 411.761.600	Rp 407.872.400	Rp (3.889.200)	99
TAHUN 2020					
1.	BELANJA OPERASI				
	- Belanja Pegawai	Rp 4.840.726.186	Rp 3.973.144.007	Rp (867.582.179)	82
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 868.576.670	Rp 759.573.772	Rp (109.002.898)	87
2.	BELANJA MODAL				
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 160.489.700	Rp 160.489.700	Rp 0,00	100
TAHUN 2021					
1.	BELANJA OPERASI				
	- Belanja Pegawai	Rp 3.689.861.186	Rp 3.331.607.782	Rp (358.253.404)	90
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.799.755.470	Rp 1.666.477.054	Rp (133.278.416)	92

2.	BELANJA MODAL - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 134.037.000	Rp 131.062.000	Rp (2.975.000)	97
TAHUN 2022					
1.	BELANJA OPERASI - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.005.255.469 Rp 2.139.376.644	Rp 2.911.909.238 Rp 1.986.854.122	Rp (93.346.231) Rp (152.522.522)	96 92
2.	BELANJA MODAL - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 783.324.800 Rp 62.500.000	Rp 782.064.880 Rp 62.437.500	Rp (1.259.920) Rp (62.500)	99 99

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP Kota Metro

Berdasarkan tabel uraian dari Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP Kota Metro di atas, hasil kinerja dari pada resapan anggaran sudah di keluarkan untuk keperluan tertentu atau sudah di realisasikan untuk keperluan tertentu yang mana sudah berjalan dengan efisien dengan persentase resapan anggarannya sudah baik dari tahun ke tahun, meskipun masih terdapat beberapa sisa anggaran yang masih belum bisa di manfaatkan atau di maksimalkan.

3. Efektivitas

Berdasarkan pada hasil penelitian, dalam efektivitas capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro sudah efektif. Dapat dilihat pada tabel perbandingan dibawah ini.

Tabel. 4.7
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi		%	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Realisasi Nilai Investasi	Rp 120 Miliar	Rp 125 Miliar	Rp 237,37 Miliar	Rp 247,10 Miliar	197,80	197,68
2.	Rasio daya serap tenaga kerja	50	50	4,03	20,32	8,06	40,42
3.	Indeks Kepuasan	88,86	89,06	84,77	89,26	95,40	100,22

Sumber: Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 & 2022

Pada tabel 4.7 diatas dapat kita lihat Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2021 & 2022. Yang mana pada indikator kinerja realisasi nilai investasi pada tahun 2021 dan 2022 sudah mencapai target bahkan mengalami peningkatan. Sedangkan pada indikator kinerja rasio daya serap tenaga kerja baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022 sangat disayangkan tidak mencapai dari target kinerja. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat dari tidak tercapainya indikator tersebut, salah satu faktor penghambatnya yaitu masih terdapat potensi data jumlah tenaga kerja yang tumpang tindih dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang disebabkan oleh data tenaga kerja per KBLI setiap satu tahun perusahaan yang mempengaruhi validitas tenaga kerja. Dan yang terakhir pada indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat di tahun 2021 masih belum mencapai target, namun pada tahun 2022 sudah mencapai target bahkan melebihi dari pada yang sudah ditargetkan. Dengan demikian perbandingan realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2021 dan 2022 sudah efektif meskipun masih

terdapat faktor yang menghambat tidak tercapainya target kinerja dari salah satu indikator kinerja tersebut.

Sedangkan dalam efektivitas penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro juga sudah efektif. Namun masih terdapat keterlambatan dalam sistem perencanaan yang mana dapat berpengaruh terhadap efisiensi serta efektivitas serapan anggaran yang mana serapan anggaran itu sendiri menjadi tidak maksimal atau tidak dapat di serap secara penuh (*surplus*). Imbas dari serapan anggaran yang tidak signifikan atau tidak terserap secara penuh itu sendiri dapat mempengaruhi penurunan performa dari berbagai aspek yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Secara garis besar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro sendiri tidak memiliki pendapatan dari segi manapun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro hanya mengelola PAD dari sektor perizinan saja, dan untuk pendapatan dari PAD itu sendiri langsung di kelola oleh BPKAD Kota Metro. Tingkat capaian efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro sudah efisien. Lalu untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja yang terealisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro maupun kualitas kinerja sudah diterapkan secara efektif namun belum efisien.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan *value* pada program yang ada di indikator kinerja agar dapat berdampak baik pada PAD Kota Metro.
2. Mempertahankan tingkat efektifitasnya berdasarkan anggaran berbasis kinerja sesuai pada kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif B, Muchlis, dan Iskandar. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta Barat: Akademia, 2009.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja*. 2005.
- Dahlana, Murni, and Junita Putri Rajana Harahap. "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara." *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)* 3.2 (2020): 456-464.
- Danila, Ova, Ridwan Ibrahim, and Syukry Abdullah. "Analisis Determinan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Skpk) di Kabupaten Bener Meriah, Aceh," *Jurnal Perspektif Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec)* 4.1 (2018): 82-94.
- Dr, P. "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D." *CV. Alfabeta, Bandung* 25 (2008).
- Dewi, L. Gede Krisna, "Analisis Angara Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali)", 2018. H. 8.
- Fitriani, Fitriani, and Armin Arsyad. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja." *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* 10.2 (2021): 141-154.
- Garrison, R. H., E. W. Noreen, and P. C. Brewer. "Akuntansi Manajerial Buku 2 (Alih Bahasa Hinduan, N., Tanujaya, E.)." *Jakarta: Salemba Empat* (2007).
- Halim, Abdul, and T. Damayanti. "Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah." *Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta* (2007).
- Herdiansyah, Haris. "Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalan data kualitatif." (2013).
- Indra, Yetti Afrida. "Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja di SKPD Privinsi Bengkulu." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.2 (2019).
- Jumame, Santrinita Trh, Herman Karamoy, and Agus T. Poputra. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Berbasis Kinerja di Pemerintah Kota Sorong." *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL*" 6.2 (2015).

Korompot, Riska, and Agus T. Poputra. "analisis penyusunan anggaran pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota kotamobagu tahun anggaran 2014." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3.1 (2015).

Kountur, Ronny. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PPM, 2013.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Kota Metro 2022.

Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta (2016), 64-66.

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Maharani, Yunita, and Rafika Sari. "Konsep Value For Money untuk Pengukuran Kinerja pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang." *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan* 2.1 (2021): 97-103.

Meiliya Dona, Eka, and Verza Ayu Lestari. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku." *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 5.2 (2020): 135-144.

Munandar, M. "Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja." *Pengawasan Kerja. Edisi Pertama. Universitas Gajah Mada: BPFE* (2001).

Munandar, Mohammad. "Budgeting: perencanaan kerja, pengkoordinasian kerja, pengawasan kerja." (2000).

Musfiqon, M. (2012). *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Nugrahani, Farida, and Muhammad Hum. "Metode penelitian kualitatif." *Solo: Cakra Books* 1.1 (2014): 3-4.

Nurhikma, R., "Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Berbasis Kinerja (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang) Tahun 2020," 10–11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02.

Parulian, S. D., & Sasongko, C. (2015). *Anggaran*. Jakarta: salemba empat.

Rudianto. (2009). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Grasindo.

Rahayu, A. S. (2010). *Pengantar kebijakan fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Santrinita.Trh.Jumame, Herman karamoy dan Agus T Poputra. 2015. FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Di Pemerintah Kota Sorong. Jurnal Akuntansi Pemerintah,Vol 2 No 2, Yogyakarta.

Siahaan, M. P. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Sancoko, Bambang. "Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia." *Departemen Keuangan Republik Indonesia* (2015).

Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing, 2015.

Sony, Y. (2005). *Penganggaran Sektor Publik*, Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD. Malang: Bayumedia Publishing.

Sulistyowati, Chorry, Elva Fariyah, and Okta Sindhu Hartadinata. *Anggaran perusahaan: teori dan praktika*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Tomu, Ahmad, and Felisia Angreyani. "Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pada Toko Phaleng Collection & Custom." *JURNAL ULET (Utility, Earning and Tax)* 5.2 (2021): 39-57.

Tulangow, Andre P dan Treesje Runtu, "Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa" (Jurnal EMBA: 2016) 564.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Sumber-sumber Penerimaan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157 tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Yulia, Ananta, and Endang Surasetyo Ningsih. "Penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) dalam pengelolaan Keuangan Daerah Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5.1 (2020): 50-58.

Yudartha, I. PutuDharmanu, and I Ketut Winaya. "Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 6.1 (2018): 1-13.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3322/In.28.3/D.1/TL.00/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Metro, 03 Oktober 2022

Kepada Yth,
Northa Idaman (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Dimas Pratama
NPM : 1903031017
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-4723/In.28/J/TL.01/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU P
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **DIMAS PRATAMA**
NPM : 1903031017
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BERBASIS KINERJA (STUDI KASUS PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA METRO)

untuk melakukan prasurvey di DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Desember 2022
Ketua Jurusan,

Northa Idaman M.M
NIP 19840820 201903 2 005

OUTLINE

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERBASIS KINERJA

**(STUDI KASUS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Anggaran
 - 1. Pengertian Anggaran
 - 2. Fungsi Anggaran
 - 3. Manfaat Angara
- B. Anggaran Berbasis Kinerja
- C. Faktor-faktor Keberhasilan Implementasi Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja
- D. Laporan Realisasi Anggaran
- E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- F. Value For Money

BAB III METODELOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian

- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - 1. Visi dan Misi Lembaga
 - 2. Tugas dan Fungsi Lembaga
 - 3. Struktur Organisasi
 - 4. Tugas Pokok Masing-masing Bagian Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro
- B. Hasil Penelitian
- C. Analisis Penelitian

BAB V PENUTUP .

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 07 Juli 2023

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Northa Idaman, M.M
NIP. 19840820 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,



Dimas Pratama
NPM. 1903031017

ALAT PENGUMPUL DATA

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERBASIS KINERJA

(STUDI KASUS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO)

A. Wawancara pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Metro

1. Apakah visi misi dari DPMPTSP Kota Metro sudah tercapai?
2. Bagaimana dengan pencapaian dari indikator kinerja utama, target, serta bagaimana dengan strategi pada DPMPTSP Kota Metro?
3. Apakah ada kaitannya DPMPTSP dengan dinas lain yang ada di Kota Metro?
4. Bagaimana pemenuhan DPMPTSP dari target atau keinginan Wali Kota Metro?

B. Wawancara pada Bagian Fungsional Perencanaan & Keuangan

1. Informasi apa saja yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran?
2. Apakah penyebab anggaran belanja tidak terealisasi secara signifikan?
3. Bagaimana dampaknya jika anggaran belanja tidak terealisasikan secara signifikan?
4. Apakah penyebab meningkatnya anggaran belanja?
5. Apakah dampak menurunnya anggaran belanja?
6. Apakah anggaran berbasis kinerja pada kegiatan surat menyurat sudah terealisasi secara signifikan?
7. Apakah target kinerja utama selalu tercapai dari tahun ke tahun?
8. Bagaimana peran indikator kinerja utama dalam pengukuran kinerja?
9. Apa saja yang menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja?

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Realisasi Nilai Investasi	Rp 120 Miliar	237,37M	Rp 125 Miliar	247,60M
Rasio daya serap tenaga kerja	50%	4,03	50%	20,32
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,86	84,77	89,06	89,26
Realisasi Anggaran	5.623.653.656	91%	5.990.456.913	95%

C. Wawancara pada Bagian Subbag Umum & Kepegawaian

1. Informasi apa saja yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran?
2. Apakah penyebab anggaran belanja tidak terealisasi secara signifikan?
3. Bagaimana dampaknya jika anggaran belanja tidak terealisasi secara signifikan?
4. Apakah penyebab meningkatnya anggaran belanja?
5. Apakah dampak menurunnya anggaran belanja?
6. Apakah anggaran berbasis kinerja pada kegiatan surat menyurat sudah terealisasi secara signifikan?

D. Wawancara pada Koordinator Kegiatan Bidang Pelayanan & Bidang Penanaman Modal

1. Bagaimana pencapaian dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibebankan?

3. Apa dampaknya pada kegiatan di bidang pelayanan dan penanaman modal jika anggaran pendapatan dan belanja tidak terealisasi secara efektif

E. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat DPMPTSP Kota Metro
2. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Metro
3. Visi dan Misi DPMPTSP Kota Metro
4. Dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Northa Idaman, M.M
NIP. 19840820 201903 1 005

Metro, 07 Juli 2023

Mahasiswa Ybs,



Dimas Pratama
NPM. 1903031017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2687/In.28/D.1/TL.00/08/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU P
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2688/In.28/D.1/TL.01/08/2023,
tanggal 25 Agustus 2023 atas nama saudara:

Nama : **DIMAS PRATAMA**
NPM : 1903031017
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (STUDI KASUS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Agustus 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2688/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DIMAS PRATAMA**
NPM : 1903031017
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (STUDI KASUS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2688/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DIMAS PRATAMA**
NPM : 1903031017
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (STUDI KASUS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1224/In.28/S/U.1/OT.01/11/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DIMAS PRATAMA
NPM : 1903031017
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1903031017

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 November 2023
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Dimas Pratama
NPM : 1903031017
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Oktober 2023
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Northa Idaman, M.M
NIP.198408202019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dimas Pratama Jurusan : Akuntansi Syariah
NPM : 1903031017 Semester/TA : VII/2022

No.	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin 21/11 22	<ol style="list-style-type: none">1. Lampir belah Lengkapi dan 3 tahun terakhir: a. pagu d. target b. target realisasi e. pendng. c. realisasi2. Lakukan wawancara dgn kasi perencanaan terkait masalah kinerja APB untuk melgri. lum belgri3. Kumpulkan dan baca ref min 5 jurnal & 3 kom tulis lamp. sudah ke despen.4. Target keen sudah akan bab 1, 2 dan 3. ± 3 minggu lagi	

Dosen Pembimbing,

Northa Idaman, M.M
NIP. 198408202019031005

Mahasiswa Ybs,

Dimas Pratama
NPM. 1903031017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dimas Pratama
NPM : 1903031017

Jurusan : Akuntansi Syariah
Semester/TA : VIII/2023

No.	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 02/05-23	<p>1) Buat dalam softs untuk APB Dinas, kemudian analisis: persentase realisasi, anggaran yg belum terserap?</p> <p>2) Wawancara dengan fungsional perencana terkait permasalahan dalam APB berbasis kinerja.</p> <p>3) Bawa data yg sudah direkap dan tanyakan kepada pengamal perencana sebagai bahan diskusi</p> <p>4) Cari dasar hukum</p>	

5) Menghadap
9/05/2023

Dosen Pembimbing,

Northa Idaman, M.M

NIP. 198408202019031005

Mahasiswa Ybs,

Dimas Pratama

NPM. 1903031017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dimas Pratama
NPM : 1903031017

Jurusan : Akuntansi Syariah
Semester/TA : VIII/2023

No.	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 23 Mei 2023	<p style="text-align: center;">LBM</p> <p>1) Apabila memungkinkan, lakukan prasarvey kembali terkait permasalahan umh</p> <ul style="list-style-type: none">a) Perencanaanb) Pelaksanaanc) Pelaporand) Pelemparan jawaban <p>2) Cek adanya pergantian kinerja Kepala Dinas</p> <p>3) Landasan Teori -> cari aturan untuk standar kinerja dinas terkait. Bisa dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pergantian kinerja?b) Aturan? <p>4) Bimbingan kembali 30/05-23</p>	

Dosen Pembimbing,

Northa Idaman, M.M
NIP. 198408202019031005

Mahasiswa Ybs,

Dimas Pratama
NPM. 1903031017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dimas Pratama
NPM : 1903031017

Jurusan : Akuntansi Syariah
Semester/TA : VIII/2023

No.	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1-	Rabu, 31 Mei 23	1) ACE Sempura 2) Buat Draft Panduan Wawancara : Ada 3 jenis panduan wawancara ① Subbag umum & kepeg ② Fungsional Perencana ③ Pemilik kegiatan	

Dosen Pembimbing,

Northa Idaman, M.M
NIP. 198408202019031005

Mahasiswa Ybs,

Dimas Pratama
NPM. 1903031017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0728) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Pratama Program Studi : Akuntansi Syariah
NPM : 1903031017 Semester/TA : VIII/2023

No.	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 11 Juli 2023	1. Perbaiki APD 2. ACC Outline 3. Segera turun laptop mencari data 4. Menghadap kembalikan 3 minggu ke depan untuk draft full skripsi	

Dosen Pembimbing,

Northa Idaman, M.M
NIP. 198408202019031005

Mahasiswa Ybs,

Dimas Pratama
NPM. 1903031017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Pratama Program Studi : Akuntansi Syariah
NPM : 1903031017 Semester/TA : VIII/2023

No.	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jumat, 07-07 23	1. LBM -> tambah pembahasan tentang IKU -> baca Tebstr 2. APD -> perampingan jgn hanya fokus pada anggaran. tapi juga harus ditampilin tentang kinerja -> Buat tabel / form target, realita dan anggaran sebagai panda wala	

Dosen Pembimbing,

Northa Idaman, M.M
NIP. 198408202019031005

Mahasiswa Ybs,

Dimas Pratama
NPM. 1903031017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Pratama Program Studi : Akuntansi Syariah
NPM : 1903031017 Semester/TA : IX/2023

No.	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jumat, 29/9-23	<ol style="list-style-type: none">1. Tambah Hasil penelitian2. Sesuaikan dengan teori value for money3. Tegaskan bahwa belum mencapai indikator rasio dengan cara yang kerna, kira-kira kenapa?4. Kesimpulan: ikuti analisis teori value for money5. Apa saran yg? untuk untuk indikator yg belum terpenuhi6. 2 minggu lagi menghidup.	

Dosen Pembimbing,

Northa Idaman, M.M
NIP. 198408202019031005

Mahasiswa Ybs,

Dimas Pratama
NPM. 1903031017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Pratama
NPM : 1903031017

Program Studi : Akuntansi Syariah
Semester/TA : IX/2023

No.	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa 10/10/2023	- A@O untuk managemen - Siapkan berkas-berkas untuk pendaftran Managemen	

Dosen Pembimbing,

Northa Idaman, M.M
NIP. 198408202019031005

Mahasiswa Ybs,

Dimas Pratama
NPM. 1903031017

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Agus Purnomo, S.E selaku Kepala Subbag Umum & Kepegawaian DPMPTSP Kota Metro



Wawancara dengan Bapak Kusno selaku Fungsional Perencanaan & Keuangan DPMPTSP Kota Metro



Wawancara dengan Ibu Ika Ariani Handayani selaku Staff Pejabat Penata Urusan Keuangan DPMPTSP Kota Metro



Wawancara dengan Ibu Kori Auliana, S.IP selaku Sekretaris DPMPTSP Kota Metro



Wawancara dengan Ibu Dra. Leny Herlina selaku Koordinator Kegiatan Bidang Pelayanan DPMPTSP Kota Metro



Wawancara dengan Bapak Antomy, S.T selaku Koordinator Kegiatan Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kota Metro



PEMERINTAH KOTA METRO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2019

Urusan Pemerintahan : 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
 Unit Organisasi : 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Sub Unit Organisasi : 2.12 . 2.12.01 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	6.700.427.655,00	0,00	5.486.514.239,00	5.486.514.239,00	(1.213.913.416,00)
5.1	BELANJA OPERASI	6.288.666.055,00	0,00	5.078.641.839,00	5.078.641.839,00	(1.210.024.216,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	4.905.586.455,00	0,00	3.744.482.358,00	3.744.482.358,00	(1.161.104.097,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.459.519.455,00	0,00	2.381.994.809,00	2.381.994.809,00	(1.077.524.646,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.339.732.785,00	0,00	1.908.060.701,00	1.908.060.701,00	(431.672.084,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	337.176.490,00	0,00	160.719.918,00	160.719.918,00	(176.456.572,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	390.400.000,00	0,00	166.530.000,00	166.530.000,00	(223.870.000,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	177.220.000,00	0,00	56.200.000,00	56.200.000,00	(121.020.000,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras	187.892.500,00	0,00	88.207.560,00	88.207.560,00	(99.684.940,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.066.360,00	0,00	2.248.712,00	2.248.712,00	(24.817.648,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji	31.320,00	0,00	27.918,00	27.918,00	(3.402,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	957.022.000,00	0,00	899.897.549,00	899.897.549,00	(57.124.451,00)
5.1.1.02.01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	957.022.000,00	0,00	899.897.549,00	899.897.549,00	(57.124.451,00)
5.1.1.08	Honorarium PNS	402.045.000,00	0,00	388.990.000,00	388.990.000,00	(13.055.000,00)
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	291.690.000,00	0,00	279.885.000,00	279.885.000,00	(11.805.000,00)
5.1.1.08.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	110.355.000,00	0,00	109.105.000,00	109.105.000,00	(1.250.000,00)
5.1.1.09	Honorarium Non PNS	87.000.000,00	0,00	73.600.000,00	73.600.000,00	(13.400.000,00)
5.1.1.09.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	87.000.000,00	0,00	73.600.000,00	73.600.000,00	(13.400.000,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.383.079.600,00	0,00	1.334.159.481,00	1.334.159.481,00	(48.920.119,00)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.384.400,00	0,00	104.322.000,00	104.322.000,00	(62.400,00)
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	89.684.400,00	0,00	89.624.000,00	89.624.000,00	(60.400,00)
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	8.460.000,00	0,00	8.458.000,00	8.458.000,00	(2.000,00)
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00
5.1.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.1.2.02.06	Belanja Bahan dan Alat	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.1.2.02.12	Belanja Bahan Materi Pameran	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.02.18	Belanja Bahan Cinderamata	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	404.230.800,00	0,00	381.409.450,00	381.409.450,00	(22.821.350,00)
5.1.2.03.01	Belanja Telepon	5.000.000,00	0,00	2.630.729,00	2.630.729,00	(2.369.271,00)
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	35.785.600,00	0,00	34.325.489,00	34.325.489,00	(1.460.111,00)
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5.1.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	46.000.000,00	0,00	33.386.551,00	33.386.551,00	(12.613.449,00)
5.1.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	70.920.200,00	0,00	70.620.200,00	70.620.200,00	(300.000,00)
5.1.2.03.19	Belanja Jasa Pendampingan	128.000.000,00	0,00	127.590.000,00	127.590.000,00	(410.000,00)
5.1.2.03.21	Belanja Jasa Hosting Website	11.000.000,00	0,00	5.931.481,00	5.931.481,00	(5.068.519,00)
5.1.2.03.22	Belanja Jasa Teknis Pendukung Pelayanan	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
5.1.2.03.26	Belanja Jasa Pihak Ketiga Biro Perjalanan	60.000.000,00	0,00	59.400.000,00	59.400.000,00	(600.000,00)
5.1.2.03.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
5.1.2.03.31	Belanja Jasa Pendukung Pelaksana Kegiatan	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	151.469.200,00	0,00	134.571.830,00	134.571.830,00	(16.897.370,00)
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	17.200.000,00	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	(2.000.000,00)
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	96.219.200,00	0,00	82.661.700,00	82.661.700,00	(13.557.500,00)
5.1.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.750.000,00	0,00	2.410.130,00	2.410.130,00	(1.339.870,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	173.705.200,00	0,00	170.240.570,00	170.240.570,00	(3.464.630,00)
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	145.638.600,00	0,00	145.498.600,00	145.498.600,00	(140.000,00)
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.066.600,00	0,00	24.741.970,00	24.741.970,00	(3.324.630,00)
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	44.750.000,00	0,00	44.750.000,00	44.750.000,00	0,00
5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	44.750.000,00	0,00	44.750.000,00	44.750.000,00	0,00
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.1.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.467.000,00	0,00	77.454.500,00	77.454.500,00	(12.500,00)
5.1.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.007.000,00	0,00	44.994.500,00	44.994.500,00	(12.500,00)
5.1.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.960.000,00	0,00	19.960.000,00	19.960.000,00	0,00
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
5.1.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	320.117.300,00	0,00	315.889.038,00	315.889.038,00	(4.228.262,00)
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.753.300,00	0,00	52.220.000,00	52.220.000,00	(2.533.300,00)
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	265.364.000,00	0,00	263.669.038,00	263.669.038,00	(1.694.962,00)
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.18.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	21.744.600,00	0,00	20.922.093,00	20.922.093,00	(822.507,00)
5.1.2.23.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	21.744.600,00	0,00	20.922.093,00	20.922.093,00	(822.507,00)
5.1.2.32	Belanja Umum Peningkatan Kesejahteraan	17.211.100,00	0,00	16.600.000,00	16.600.000,00	(611.100,00)
5.1.2.32.02	Biaya Transport Peserta Pelatihan/Lomba	10.500.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(500.000,00)
5.1.2.32.04	Biaya transport Pelaksana Kegiatan	6.711.100,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	(111.100,00)
5.2	BELANJA MODAL	411.761.600,00	0,00	407.872.400,00	407.872.400,00	(3.889.200,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.761.600,00	0,00	407.872.400,00	407.872.400,00	(3.889.200,00)
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.11.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kemetrolagian	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.2.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.874.700,00	0,00	7.874.700,00	7.874.700,00	0,00
5.2.2.15.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan TV	7.874.700,00	0,00	7.874.700,00	7.874.700,00	0,00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	183.108.700,00	0,00	182.408.700,00	182.408.700,00	(700.000,00)
5.2.2.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer/PC	67.841.700,00	0,00	67.649.700,00	67.649.700,00	(192.000,00)
5.2.2.16.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Notebook	49.601.400,00	0,00	49.431.400,00	49.431.400,00	(170.000,00)
5.2.2.16.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Printer	18.865.600,00	0,00	18.673.600,00	18.673.600,00	(192.000,00)
5.2.2.16.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Scanner	14.000.000,00	0,00	13.854.000,00	13.854.000,00	(146.000,00)
5.2.2.16.12	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk dan Speaker)	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.16.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Software	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	34.749.200,00	0,00	32.800.000,00	32.800.000,00	(1.949.200,00)
5.2.2.17.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.2.2.17.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	11.957.600,00	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	(1.357.600,00)
5.2.2.17.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	4.791.600,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	(591.600,00)
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5.2.2.18.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Kamera CCTV	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 19 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pendukung Komunikasi	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perlengkapan Kantor	115.029.000,00	0,00	113.789.000,00	113.789.000,00	(1.240.000,00)
5 . 2 . 2 . 37 . 07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	25.029.000,00	0,00	24.489.000,00	24.489.000,00	(540.000,00)
5 . 2 . 2 . 37 . 09	Belanja Modal Pengadaan Genset	70.000.000,00	0,00	69.300.000,00	69.300.000,00	(700.000,00)
5 . 2 . 2 . 37 . 14	Belanja Modal Acces Control	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 37 . 21	Belanja Modal Pengadaan Rak Besi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(6.700.427.655,00)	0,00	(5.486.514.239,00)	(5.486.514.239,00)	1.213.913.416,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.700.427.655,00)	0,00	(5.486.514.239,00)	(5.486.514.239,00)	1.213.913.416,00



PEMERINTAH KOTA METRO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Unit Organisasi : 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.12 . 2.12.01 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	5.869.792.556,00	0,00	4.893.207.479,00	4.893.207.479,00	(976.585.077,00)
5.1	BELANJA OPERASI	5.709.302.856,00	0,00	4.732.717.779,00	4.732.717.779,00	(976.585.077,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	4.840.726.186,00	0,00	3.973.144.007,00	3.973.144.007,00	(867.582.179,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.067.298.819,00	0,00	2.358.078.223,00	2.358.078.223,00	(709.220.596,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.429.572.149,00	0,00	1.877.789.100,00	1.877.789.100,00	(551.783.049,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	174.856.490,00	0,00	167.057.974,00	167.057.974,00	(7.798.516,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	179.400.000,00	0,00	168.285.000,00	168.285.000,00	(11.115.000,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	104.900.000,00	0,00	53.370.000,00	53.370.000,00	(51.530.000,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras	151.472.500,00	0,00	89.583.540,00	89.583.540,00	(61.888.960,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.066.360,00	0,00	1.967.305,00	1.967.305,00	(25.099.055,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji	31.320,00	0,00	25.304,00	25.304,00	(6.016,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.157.182.367,00	0,00	1.043.275.784,00	1.043.275.784,00	(113.906.583,00)
5.1.1.02.01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	568.838.208,00	0,00	517.680.496,00	517.680.496,00	(51.157.712,00)
5.1.1.02.03	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	23.925.123,00	0,00	17.442.566,00	17.442.566,00	(6.482.557,00)
5.1.1.02.04	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	27.036.068,00	0,00	20.309.801,00	20.309.801,00	(6.726.267,00)
5.1.1.02.05	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	265.632.968,00	0,00	240.215.452,00	240.215.452,00	(25.417.516,00)
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	271.750.000,00	0,00	247.627.469,00	247.627.469,00	(24.122.531,00)
5.1.1.08	Honorarium PNS	353.695.000,00	0,00	327.890.000,00	327.890.000,00	(25.805.000,00)
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	141.855.000,00	0,00	134.940.000,00	134.940.000,00	(6.915.000,00)
5.1.1.08.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	211.840.000,00	0,00	192.950.000,00	192.950.000,00	(18.890.000,00)
5.1.1.09	Honorarium Non PNS	262.550.000,00	0,00	243.900.000,00	243.900.000,00	(18.650.000,00)
5.1.1.09.01	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	186.800.000,00	0,00	169.400.000,00	169.400.000,00	(17.400.000,00)
5.1.1.09.02	Honorarium Pelaksana Kegiatan	75.750.000,00	0,00	74.500.000,00	74.500.000,00	(1.250.000,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	868.576.670,00	0,00	759.573.772,00	759.573.772,00	(109.002.898,00)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.457.038,00	0,00	105.711.238,00	105.711.238,00	(745.800,00)
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.884.200,00	0,00	88.646.800,00	88.646.800,00	(237.400,00)
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.631.538,00	0,00	3.631.538,00	3.631.538,00	0,00
5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	9.347.000,00	0,00	9.347.000,00	9.347.000,00	0,00

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.844.300,00	0,00	3.835.900,00	3.835.900,00	(8.400,00)
5.1.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.09	Belanja Bilyet Giro/Cek	750.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	(500.000,00)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.06	Belanja Bahan dan Alat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.12	Belanja Bahan Materi Pameran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	228.493.200,00	0,00	197.786.909,00	197.786.909,00	(30.706.291,00)
5.1.2.03.01	Belanja Telepon	6.368.600,00	0,00	4.201.727,00	4.201.727,00	(2.166.873,00)
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	70.478.000,00	0,00	57.519.149,00	57.519.149,00	(12.958.851,00)
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00
5.1.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	56.315.600,00	0,00	41.510.033,00	41.510.033,00	(14.805.567,00)
5.1.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	13.275.000,00	0,00	13.150.000,00	13.150.000,00	(125.000,00)
5.1.2.03.18	Belanja Kontribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.19	Belanja Jasa Pendampingan	70.246.000,00	0,00	70.246.000,00	70.246.000,00	0,00
5.1.2.03.21	Belanja Penunjang Administrasi Sekolah	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.1.2.03.24	Belanja Retribusi Sampah	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.1.2.03.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.31	Belanja Jasa Pendukung Pelaksana Kegiatan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,00)
5.1.2.03.39	Belanja Jasa Moderator	200.000,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,00)
5.1.2.03.43	Belanja Jasa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.44	Belanja Jasa Pemimpin Lagu	100.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
5.1.2.03.45	Belanja Jasa Pembaca Doa/Rohanianawan	150.000,00	0,00	0,00	0,00	(150.000,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	161.212.732,00	0,00	132.311.925,00	132.311.925,00	(28.900.807,00)
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	101.912.732,00	0,00	75.736.200,00	75.736.200,00	(26.176.532,00)
5.1.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.300.000,00	0,00	3.575.725,00	3.575.725,00	(2.724.275,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.953.700,00	0,00	136.293.700,00	136.293.700,00	(660.000,00)
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	108.358.400,00	0,00	107.758.400,00	107.758.400,00	(600.000,00)
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.595.300,00	0,00	28.535.300,00	28.535.300,00	(60.000,00)
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.07.05	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.271.000,00	0,00	23.952.800,00	23.952.800,00	(6.318.200,00)
5.1.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.994.000,00	0,00	8.957.800,00	8.957.800,00	(36.200,00)

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.402.000,00	0,00	12.880.000,00	12.880.000,00	(2.522.000,00)
5.1.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.875.000,00	0,00	2.115.000,00	2.115.000,00	(3.760.000,00)
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.564.000,00	0,00	44.077.300,00	44.077.300,00	(38.486.700,00)
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.600.000,00	0,00	15.039.000,00	15.039.000,00	(8.561.000,00)
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.964.000,00	0,00	29.038.300,00	29.038.300,00	(29.925.700,00)
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	112.350.000,00	0,00	111.762.000,00	111.762.000,00	(588.000,00)
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.18.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.350.000,00	0,00	111.762.000,00	111.762.000,00	(588.000,00)
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.275.000,00	0,00	5.977.900,00	5.977.900,00	(297.100,00)
5.1.2.23.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6.275.000,00	0,00	5.977.900,00	5.977.900,00	(297.100,00)
5.1.2.32	Belanja Umum Peningkatan Kesejahteraan	4.000.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	(2.300.000,00)
5.1.2.32.02	Biaya Transport Peserta Pelatihan/Lomba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.32.04	Biaya transport Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	(2.300.000,00)
5.1.2.32.05	Biaya Khusus Pengawasan Internal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	160.489.700,00	0,00	160.489.700,00	160.489.700,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.489.700,00	0,00	160.489.700,00	160.489.700,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00
5.2.2.14.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama dan Data	19.100.000,00	0,00	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00
5.2.2.14.15	Belanja Modal Pengadaan Tangga	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00
5.2.2.15.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00
5.2.2.15.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.940.300,00	0,00	40.940.300,00	40.940.300,00	0,00
5.2.2.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer/PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Notebook	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.2.16.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Printer	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
5.2.2.16.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Monitor/Display	2.140.300,00	0,00	2.140.300,00	2.140.300,00	0,00
5.2.2.16.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Software	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.941.000,00	0,00	15.941.000,00	15.941.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	15.941.000,00	0,00	15.941.000,00	15.941.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 17 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 17 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Meja Tunggu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 18 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Handycam	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perlengkapan Kantor	69.693.400,00	0,00	69.693.400,00	69.693.400,00	0,00
5 . 2 . 2 . 37 . 04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6.793.400,00	0,00	6.793.400,00	6.793.400,00	0,00
5 . 2 . 2 . 37 . 10	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 37 . 25	Belanja Modal Pengadaan Alat Survey Kepuasan Masyarakat	60.200.000,00	0,00	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(5.869.792.556,00)	0,00	(4.893.207.479,00)	(4.893.207.479,00)	976.585.077,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.869.792.556,00)	0,00	(4.893.207.479,00)	(4.893.207.479,00)	976.585.077,00



PEMERINTAH KOTA METRO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Unit Organisasi : 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.12 . 2.12.01 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	5.623.653.656,00	0,00	5.129.146.836,00	5.129.146.836,00	(494.506.820,00)
5.1	BELANJA OPERASI	5.489.616.656,00	0,00	4.998.084.836,00	4.998.084.836,00	(491.531.820,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	3.689.861.186,00	0,00	3.331.607.782,00	3.331.607.782,00	(358.253.404,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.529.048.819,00	0,00	2.299.577.931,00	2.299.577.931,00	(229.470.888,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.891.322.149,00	0,00	1.810.873.858,00	1.810.873.858,00	(80.448.291,00)
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.891.322.149,00	0,00	1.810.873.858,00	1.810.873.858,00	(80.448.291,00)
5.1.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	209.856.490,00	0,00	167.961.022,00	167.961.022,00	(41.895.468,00)
5.1.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	209.856.490,00	0,00	167.961.022,00	167.961.022,00	(41.895.468,00)
5.1.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	204.400.000,00	0,00	164.910.000,00	164.910.000,00	(39.490.000,00)
5.1.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	204.400.000,00	0,00	164.910.000,00	164.910.000,00	(39.490.000,00)
5.1.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	89.900.000,00	0,00	50.640.000,00	50.640.000,00	(39.260.000,00)
5.1.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	89.900.000,00	0,00	50.640.000,00	50.640.000,00	(39.260.000,00)
5.1.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	126.472.500,00	0,00	102.981.240,00	102.981.240,00	(23.491.260,00)
5.1.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	126.472.500,00	0,00	102.981.240,00	102.981.240,00	(23.491.260,00)
5.1.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.066.360,00	0,00	2.186.869,00	2.186.869,00	(4.879.491,00)
5.1.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.066.360,00	0,00	2.186.869,00	2.186.869,00	(4.879.491,00)
5.1.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.320,00	0,00	24.942,00	24.942,00	(6.378,00)
5.1.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.320,00	0,00	24.942,00	24.942,00	(6.378,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.045.432.367,00	0,00	934.349.851,00	934.349.851,00	(111.082.516,00)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	493.838.208,00	0,00	459.345.553,00	459.345.553,00	(34.492.655,00)
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	493.838.208,00	0,00	459.345.553,00	459.345.553,00	(34.492.655,00)
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	118.925.123,00	0,00	84.980.391,00	84.980.391,00	(33.944.732,00)
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	118.925.123,00	0,00	84.980.391,00	84.980.391,00	(33.944.732,00)
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	52.036.068,00	0,00	30.752.755,00	30.752.755,00	(21.283.313,00)
5.1.1.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	52.036.068,00	0,00	30.752.755,00	30.752.755,00	(21.283.313,00)
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	380.632.968,00	0,00	359.271.152,00	359.271.152,00	(21.361.816,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	380.632.968,00	0,00	359.271.152,00	359.271.152,00	(21.361.816,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	115.380.000,00	0,00	97.680.000,00	97.680.000,00	(17.700.000,00)
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	115.380.000,00	0,00	97.680.000,00	97.680.000,00	(17.700.000,00)
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	107.220.000,00	0,00	89.520.000,00	89.520.000,00	(17.700.000,00)
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.799.755.470,00	0,00	1.666.477.054,00	1.666.477.054,00	(133.278.416,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	395.273.920,00	0,00	386.038.400,00	386.038.400,00	(9.235.520,00)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	395.273.920,00	0,00	386.038.400,00	386.038.400,00	(9.235.520,00)
5.1.2.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.650.000,00	0,00	1.589.000,00	1.589.000,00	(61.000,00)
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.635.100,00	0,00	9.635.100,00	9.635.100,00	0,00
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	106.868.550,00	0,00	106.846.750,00	106.846.750,00	(21.800,00)
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	67.338.600,00	0,00	67.056.600,00	67.056.600,00	(282.000,00)
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	59.284.870,00	0,00	59.121.700,00	59.121.700,00	(163.170,00)
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.022.000,00	0,00	3.022.000,00	3.022.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.913.600,00	0,00	5.913.600,00	5.913.600,00	0,00
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.845.000,00	0,00	37.784.000,00	37.784.000,00	(5.061.000,00)
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	475.000,00	0,00	470.250,00	470.250,00	(4.750,00)
5.1.2.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10.651.200,00	0,00	10.629.400,00	10.629.400,00	(21.800,00)
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	82.720.000,00	0,00	79.100.000,00	79.100.000,00	(3.620.000,00)
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	983.169.550,00	0,00	927.669.238,00	927.669.238,00	(55.500.312,00)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	830.719.550,00	0,00	776.109.238,00	776.109.238,00	(54.610.312,00)
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Nerasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	88.725.000,00	0,00	87.150.000,00	87.150.000,00	(1.575.000,00)
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	76.170.000,00	0,00	74.070.000,00	74.070.000,00	(2.100.000,00)
5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	257.300.000,00	0,00	253.400.000,00	253.400.000,00	(3.900.000,00)
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.000.000,00	0,00	3.655.500,00	3.655.500,00	(344.500,00)

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	86.400.000,00	0,00	84.450.000,00	84.450.000,00	(1.950.000,00)
5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	16.476.000,00	0,00	16.260.000,00	16.260.000,00	(216.000,00)
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.850.350,00	0,00	1.468.755,00	1.468.755,00	(2.381.595,00)
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	52.225.200,00	0,00	36.945.362,00	36.945.362,00	(15.279.838,00)
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.990.000,00	0,00	7.986.000,00	7.986.000,00	(4.000,00)
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	63.960.000,00	0,00	40.414.871,00	40.414.871,00	(23.545.129,00)
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.750.000,00	0,00	3.903.750,00	3.903.750,00	(846.250,00)
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	47.473.000,00	0,00	45.005.000,00	45.005.000,00	(2.468.000,00)
5.1.2.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.07.0034	Belanja Sewa Barang Kerajinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000,00	0,00	149.112.000,00	149.112.000,00	(888.000,00)
5.1.2.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000,00	0,00	49.700.000,00	49.700.000,00	(300.000,00)
5.1.2.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00	0,00	99.412.000,00	99.412.000,00	(588.000,00)
5.1.2.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	2.450.000,00	0,00	2.448.000,00	2.448.000,00	(2.000,00)
5.1.2.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	2.450.000,00	0,00	2.448.000,00	2.448.000,00	(2.000,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	162.880.000,00	0,00	156.071.950,00	156.071.950,00	(6.808.050,00)
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	147.880.000,00	0,00	141.169.600,00	141.169.600,00	(6.710.400,00)
5.1.2.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	101.010.000,00	0,00	100.982.000,00	100.982.000,00	(28.000,00)
5.1.2.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.500.000,00	0,00	11.817.600,00	11.817.600,00	(6.682.400,00)
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
5.1.2.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00
5.1.2.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	0,00	14.902.350,00	14.902.350,00	(97.650,00)
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	0,00	14.902.350,00	14.902.350,00	(97.650,00)
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	258.432.000,00	0,00	196.697.466,00	196.697.466,00	(61.734.534,00)
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	258.432.000,00	0,00	196.697.466,00	196.697.466,00	(61.734.534,00)
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.954.000,00	0,00	60.241.330,00	60.241.330,00	(50.712.670,00)
5.1.2.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	11.978.000,00	0,00	6.206.136,00	6.206.136,00	(5.771.864,00)

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	135.500.000,00	0,00	130.250.000,00	130.250.000,00	(5.250.000,00)
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	134.037.000,00	0,00	131.062.000,00	131.062.000,00	(2.975.000,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.037.000,00	0,00	131.062.000,00	131.062.000,00	(2.975.000,00)
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	48.830.000,00	0,00	46.266.000,00	46.266.000,00	(2.564.000,00)
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.116.000,00	0,00	6.116.000,00	6.116.000,00	0,00
5.2.2.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	6.116.000,00	0,00	6.116.000,00	6.116.000,00	0,00
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	42.714.000,00	0,00	40.150.000,00	40.150.000,00	(2.564.000,00)
5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	33.134.000,00	0,00	33.134.000,00	33.134.000,00	0,00
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00
5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.564.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	(2.564.000,00)
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.299.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	(49.000,00)
5.2.2.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.299.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	(49.000,00)
5.2.2.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	7.299.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	(49.000,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	77.908.000,00	0,00	77.546.000,00	77.546.000,00	(362.000,00)
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	74.602.000,00	0,00	74.300.000,00	74.300.000,00	(302.000,00)
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	74.602.000,00	0,00	74.300.000,00	74.300.000,00	(302.000,00)
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.306.000,00	0,00	3.246.000,00	3.246.000,00	(60.000,00)
5.2.2.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	846.000,00	0,00	846.000,00	846.000,00	0,00
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.460.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	(60.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(5.623.653.656,00)	0,00	(5.129.146.836,00)	(5.129.146.836,00)	494.506.820,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.623.653.656,00)	0,00	(5.129.146.836,00)	(5.129.146.836,00)	494.506.820,00



PEMERINTAH KOTA METRO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	5.990.456.913,00	0,00	5.743.265.740,00	5.743.265.740,00	(247.191.173,00)
5.1	BELANJA OPERASI	5.144.632.113,00	0,00	4.898.763.360,00	4.898.763.360,00	(245.868.753,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	3.005.255.469,00	0,00	2.911.909.238,00	2.911.909.238,00	(93.346.231,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.261.205.629,00	0,00	2.182.281.554,00	2.182.281.554,00	(78.924.075,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.742.162.495,00	0,00	1.706.173.400,00	1.706.173.400,00	(35.989.095,00)
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.742.162.495,00	0,00	1.706.173.400,00	1.706.173.400,00	(35.989.095,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	182.732.834,00	0,00	169.276.676,00	169.276.676,00	(13.456.158,00)
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	182.732.834,00	0,00	169.276.676,00	169.276.676,00	(13.456.158,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	61.120.000,00	0,00	53.565.000,00	53.565.000,00	(7.555.000,00)
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	61.120.000,00	0,00	53.565.000,00	53.565.000,00	(7.555.000,00)
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	108.800.000,00	0,00	101.940.000,00	101.940.000,00	(6.860.000,00)
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	108.800.000,00	0,00	101.940.000,00	101.940.000,00	(6.860.000,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	54.520.000,00	0,00	48.260.000,00	48.260.000,00	(6.260.000,00)
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	54.520.000,00	0,00	48.260.000,00	48.260.000,00	(6.260.000,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	107.770.020,00	0,00	101.605.260,00	101.605.260,00	(6.164.760,00)
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	107.770.020,00	0,00	101.605.260,00	101.605.260,00	(6.164.760,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.066.360,00	0,00	1.437.233,00	1.437.233,00	(2.629.127,00)
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.066.360,00	0,00	1.437.233,00	1.437.233,00	(2.629.127,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.920,00	0,00	23.985,00	23.985,00	(9.935,00)
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.920,00	0,00	23.985,00	23.985,00	(9.935,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	696.679.840,00	0,00	683.057.684,00	683.057.684,00	(13.622.156,00)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	360.367.315,00	0,00	357.007.156,00	357.007.156,00	(3.360.159,00)
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	360.367.315,00	0,00	357.007.156,00	357.007.156,00	(3.360.159,00)
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	62.760.582,00	0,00	60.380.671,00	60.380.671,00	(2.379.911,00)
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	62.760.582,00	0,00	60.380.671,00	60.380.671,00	(2.379.911,00)
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	28.891.565,00	0,00	23.068.844,00	23.068.844,00	(5.822.721,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LAJU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	28.891.565,00	0,00	23.068.844,00	23.068.844,00	(5.822.721,00)
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	244.660.378,00	0,00	242.601.013,00	242.601.013,00	(2.059.365,00)
5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	244.660.378,00	0,00	242.601.013,00	242.601.013,00	(2.059.365,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47.370.000,00	0,00	46.570.000,00	46.570.000,00	(800.000,00)
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	47.370.000,00	0,00	46.570.000,00	46.570.000,00	(800.000,00)
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Peranggungjawaban Pengetole Keuangan	39.210.000,00	0,00	38.410.000,00	38.410.000,00	(800.000,00)
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.139.376.644,00	0,00	1.986.854.122,00	1.986.854.122,00	(152.522.522,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	751.475.150,00	0,00	716.473.032,00	716.473.032,00	(35.002.118,00)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	751.475.150,00	0,00	716.473.032,00	716.473.032,00	(35.002.118,00)
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.567.500,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	(127.500,00)
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	32.630.500,00	0,00	31.129.100,00	31.129.100,00	(1.501.400,00)
5.1.2.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	16.250.000,00	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	157.008.150,00	0,00	156.661.350,00	156.661.350,00	(346.800,00)
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	160.474.700,00	0,00	159.266.222,00	159.266.222,00	(1.208.478,00)
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	109.280.800,00	0,00	107.036.800,00	107.036.800,00	(2.244.000,00)
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.510.000,00	0,00	5.390.000,00	5.390.000,00	(120.000,00)
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	8.084.000,00	0,00	8.084.000,00	8.084.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.117.000,00	0,00	12.838.400,00	12.838.400,00	(278.600,00)
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	123.263.000,00	0,00	94.088.060,00	94.088.060,00	(29.174.940,00)
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	32.258.500,00	0,00	32.258.100,00	32.258.100,00	(400,00)
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35.831.000,00	0,00	35.831.000,00	35.831.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.450.000,00	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	942.469.494,00	0,00	905.885.646,00	905.885.646,00	(36.583.848,00)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	818.918.444,00	0,00	786.753.046,00	786.753.046,00	(32.165.398,00)
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	104.600.000,00	0,00	96.590.000,00	96.590.000,00	(8.010.000,00)
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	32.365.000,00	0,00	31.405.000,00	31.405.000,00	(960.000,00)
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	(200.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LAJU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	62.600.000,00	0,00	62.600.000,00	62.000.000,00	(600.000,00)
5.1.2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pebyanan Umum	215.000.000,00	0,00	215.800.000,00	215.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	91.800.000,00	0,00	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	6.000.000,00	0,00	5.847.706,00	5.047.706,00	(952.294,00)
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	100.170.000,00	0,00	93.946.500,00	93.946.500,00	(6.223.500,00)
5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.000.000,00	0,00	3.800.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	11.450.000,00	0,00	10.744.800,00	10.744.800,00	(705.200,00)
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.575.000,00	0,00	1.505.463,00	1.505.463,00	(69.537,00)
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	43.007.444,00	0,00	43.007.444,00	43.007.444,00	0,00
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.365.000,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	(5.000,00)
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	51.960.000,00	0,00	40.448.238,00	40.448.238,00	(11.511.762,00)
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.450.000,00	0,00	2.886.895,00	2.886.895,00	(1.563.105,00)
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	78.776.000,00	0,00	77.411.000,00	77.411.000,00	(1.365.000,00)
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.350.000,00	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	(3.600.000,00)
5.1.2.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	1.000.000,00	0,00	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00
5.1.2.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	3.000.000,00	0,00	3.800.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
5.1.2.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.600.000,00)
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	0,00	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00
5.1.2.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	1.000.000,00	0,00	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	107.000.000,00	0,00	106.181.600,00	106.181.600,00	(818.400,00)
5.1.2.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	22.000.000,00	0,00	21.850.000,00	21.850.000,00	(150.000,00)
5.1.2.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	35.000.000,00	0,00	34.537.000,00	34.537.000,00	(463.000,00)
5.1.2.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000,00	0,00	49.794.600,00	49.794.600,00	(205.400,00)
5.1.2.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	4.201.050,00	0,00	4.201.000,00	4.201.000,00	(50,00)
5.1.2.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	4.201.050,00	0,00	4.201.000,00	4.201.000,00	(50,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	150.370.000,00	0,00	150.369.500,00	150.369.500,00	(500,00)
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.370.000,00	0,00	150.369.500,00	150.369.500,00	(500,00)
5.1.2.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	106.010.000,00	0,00	106.809.500,00	106.009.500,00	(500,00)
5.1.2.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
5.1.2.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00
5.1.2.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	11.040.000,00	0,00	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	289.062.000,00	0,00	208.125.944,00	208.125.944,00	(80.936.056,00)
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	289.062.000,00	0,00	208.125.944,00	208.125.944,00	(80.936.056,00)
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	177.562.000,00	0,00	130.575.944,00	130.575.944,00	(46.986.056,00)
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	111.500.000,00	0,00	77.550.000,00	77.550.000,00	(33.950.000,00)
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.2.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	845.824.800,00	0,00	844.502.380,00	844.502.380,00	(1.322.420,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	783.324.800,00	0,00	782.064.880,00	782.064.880,00	(1.259.920,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	451.208.800,00	0,00	450.574.880,00	450.574.880,00	(633.920,00)
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	109.067.800,00	0,00	108.914.300,00	108.914.300,00	(153.500,00)
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	109.067.800,00	0,00	108.914.300,00	108.914.300,00	(153.500,00)
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	327.241.000,00	0,00	326.810.580,00	326.810.580,00	(430.420,00)
5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	99.165.000,00	0,00	99.160.580,00	99.160.580,00	(4.420,00)
5.2.2.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	183.476.000,00	0,00	183.150.000,00	183.150.000,00	(326.000,00)
5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	39.600.000,00	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	(100.000,00)
5.2.2.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.900.000,00	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	(50.000,00)
5.2.2.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tanam di Ruangannya	14.900.000,00	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	(50.000,00)
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Peniaras	13.149.000,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	(49.000,00)
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.299.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	(49.000,00)
5.2.2.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	7.299.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	(49.000,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	318.967.000,00	0,00	318.390.000,00	318.390.000,00	(577.000,00)
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	243.000.000,00	0,00	242.799.000,00	242.799.000,00	(201.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	243.000.000,00	0,00	242.799.000,00	242.799.000,00	(201.000,00)
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	75.967.000,00	0,00	75.591.000,00	75.591.000,00	(376.000,00)
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00	0,00
5.2.2.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	5.344.000,00	0,00	5.344.000,00	5.344.000,00	0,00
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	69.145.000,00	0,00	68.769.000,00	68.769.000,00	(376.000,00)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	62.500.000,00	0,00	62.437.500,00	62.437.500,00	(62.500,00)
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	62.500.000,00	0,00	62.437.500,00	62.437.500,00	(62.500,00)
5.2.5.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	62.500.000,00	0,00	62.437.500,00	62.437.500,00	(62.500,00)
5.2.5.08.01.0001	Belanja Modal Goodwill	62.500.000,00	0,00	62.437.500,00	62.437.500,00	(62.500,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(5.990.456.913,00)	0,00	(5.743.265.740,00)	(5.743.265.740,00)	247.191.173,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.990.456.913,00)	0,00	(5.743.265.740,00)	(5.743.265.740,00)	247.191.173,00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dimas Pratama lahir di Depok Rejo, 22 Agustus 2001 dari pasangan suami istri Bapak Sutrisno dan Ibu Daryati. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Pendidikan peneliti di mulai dari TK PKK Liman Benawi dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Depok Rejo dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Trimurjo dan lulus pada tahun 2016. Lalu peneliti melanjutkan ke SMK Muhammadiyah 3 Metro dengan mengambil Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dan lulus pada tahun 2019. Hingga akhirnya pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.